



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 3

TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha ke depan.

Jakarta, 15 Oktober 2024

Direktur Pemberdayaan Usaha



Catur Sarwanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2024 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama periode triwulan III Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan nilai investasi dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Pemberdayaan Usaha dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja.

Dari 17 indikator kinerja tersebut sebanyak 14 (empat belas) telah dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2024, sedangkan indikator kinerja lainnya belum dapat diukur karena tidak ada target capaian pada triwulan III. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut ke-14 indikator kinerja telah mencapai target Triwulan III tahun 2024. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan III Tahun 2024 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 105,27%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Dari 17 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 9 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 7 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 9 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi, (2) Persentase

peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program, (3) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha, (4) Nilai penilaian mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (5) Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (6) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, (7) Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (8) Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha dan (9) Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha.

3. Sebanyak 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 7 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Dokumen Peluang Investasi yang *Ready to Offer*, (2) Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan, (3) Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, (4) Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, (5) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha, (6) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir, (7) Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan.
5. Pencapaian realisasi indikator kinerja triwulan III atas 7 indikator yang bersifat triwulanan adalah (1) Dokumen Peluang Investasi yang *Ready to Offer*, terealisasi 2 peluang investasi *ready to offer* Komoditas Tuna di Kabupaten Biak Numfor dan peluang investasi *ready to offer* di Tual dari target 2 dokumen atau dengan kata lain tercapai 100%; (2) Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan, teralisasi 3 kegiatan promosi dari target 3 kegiatan atau dengan kata lain tercapai 100%; (3) Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, terealisasi 26 lembaga dari target 26 lembaga atau dengan kata lain tercapai 100%; (4) Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, terealisasi 650 pelaku usaha dari target 650 pelaku usaha atau dengan kata lain tercapai 100%; (5) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha, terealisasi 1473 UMKM dari target 1550 UMKM atau dengan kata lain tercapai 95,03%; (6) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu

hilir, terealisasi 75 UMKM dari target 96 UMKM atau dengan kata lain tercapai 78,13%;

Pada Tahun 2024, anggaran Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah sebesar Rp22.723.500.000,-. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat blokir sebesar Rp4.916.515.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp17.806.985.000,-. Penyerapan anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar Rp10.528.923.775,- atau setara dengan 46,33% terhadap total pagu anggaran awal atau 59,13% terhadap pagu anggaran pasca blokir.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah dicapai selama triwulan III Tahun 2024, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Tugas dan Fungsi 2

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia 4

1.5. Permasalahan Utama 6

1.6. Sistematika Penyajian 7

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 9

2.1. Rencana Strategis 9

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 18

3.1. Capaian Kinerja 18

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja 19

3.2.1. Sasaran Strategis 1 20

Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan 20

3.2.2. Sasaran Strategis 2 23

Tersedianya Peluang Investasi Yang *Ready to Offer* 23

3.2.3 Sasaran Strategis 3 29

Terlaksananya promosi udaha dan investasi 29

3.2.4 Sasaran Strategis 4 36

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	36
3.2.5 Sasaran Strategis 5	44
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	44
3.2.6 Sasaran Strategis 6	66
Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	66
3.2.7 Sasaran Strategis 7	69
Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	69
BAB IV. PENUTUP	83
4.1. Kesimpulan	83
4.2. Rekomendasi	83
4.3. Tindak Lanjut	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Pemberdayaan Usaha..... 16

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2024 19

Tabel 3. 2 khtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan III Tahun 2024 .21

Tabel 3. 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan II Tahun 202423

Tabel 3. 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang Ready to Offer Triwulan III Tahun 202424

Tabel 3. 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan III 202430

Tabel 3. 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan III 2024.....37

Tabel 3. 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan III Tahun 2024 45

Tabel 3. 8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha Triwulan III Tahun 202449

Tabel 3. 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan III Tahun 202457

Tabel 3. 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 202466

Tabel 3. 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 202469

Tabel 3. 12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II Tahun 202471

Tabel 3. 13 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan III Tahun 2024.....72

Tabel 3. 14 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 202476

Tabel 3. 15 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2024	77
Tabel 3. 16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan III Tahun 2024.....	79
Tabel 3. 17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan IV Tahun 2024	80
Tabel 3. 18 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang).....4

Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan5

Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin5

Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan6

Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha
..Error! Bookmark not defined.

Gambar 3. 2 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 36 Dashboard IP ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 202471

Gambar 3. 37 Pembahasan pengukuran capaian kinerja lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 202473

Gambar 3. 38 Pembahasan laporan kinerja level 1 dan 2 Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 202473

Gambar 3. 39 Pembahasan validasi Indikator Kinerja Level I dan II Ditjen PDSPKP Tahun 202474

Gambar 3. 40 Pembahasan Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029.....74

Gambar 3. 41 Rapat pemutakhiran target dan capaian rencana aksi nasional (RAN) Kewirausahaan dan KUKM TW I Tahun 202474

Gambar 3. 42 Rapat pemutakhiran data progres pencapaian output lingkup Ditjen PDSPKP sampai dengan bulan Mei 202475

Gambar 3. 43 Pembahasan Mekanisme dan Pedoman SAKIP serta Uji coba penilaian PM SAKIP lingkup Ditjen DSPKP Tahun 202475

Gambar 3. 44 Penilaian Mandiri SAKIP Unit Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 202476

Gambar 3. 45 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 16 Oktober 202478

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2024 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1136/M.KT.01/2020, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 25 September 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
- c. Direktorat Logistik;
- d. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; dan
- e. Direktorat Pemasaran.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan keberlanjutan usaha dan investasi meliputi pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan.

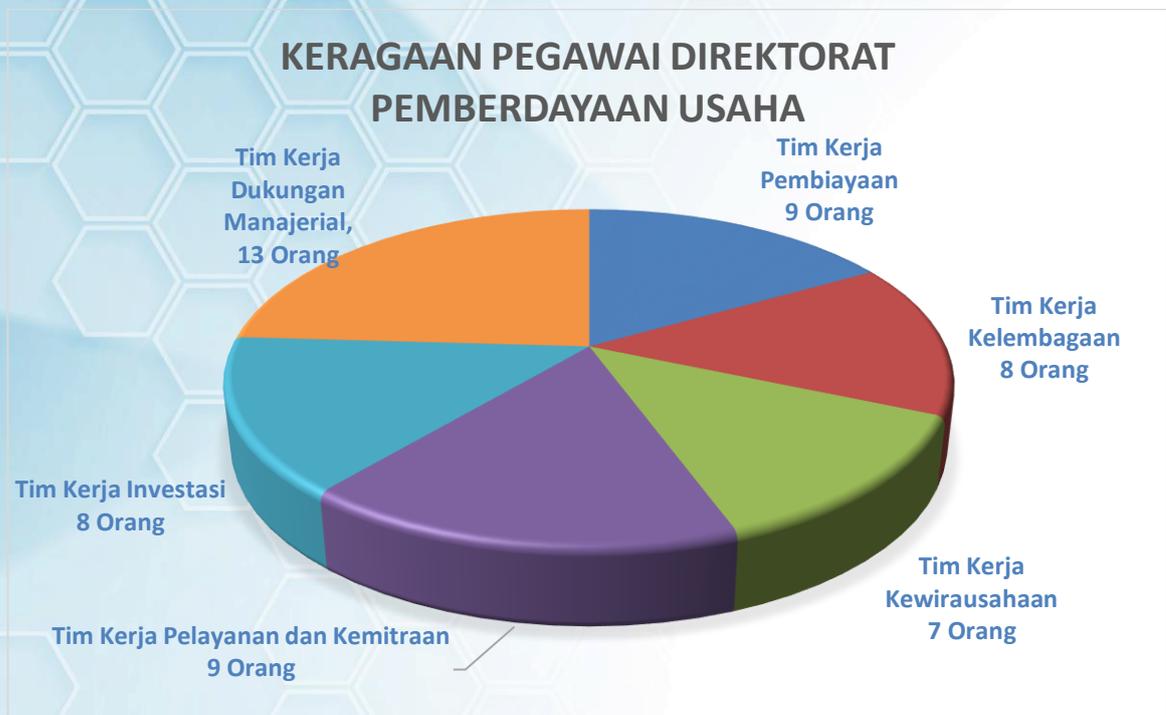
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

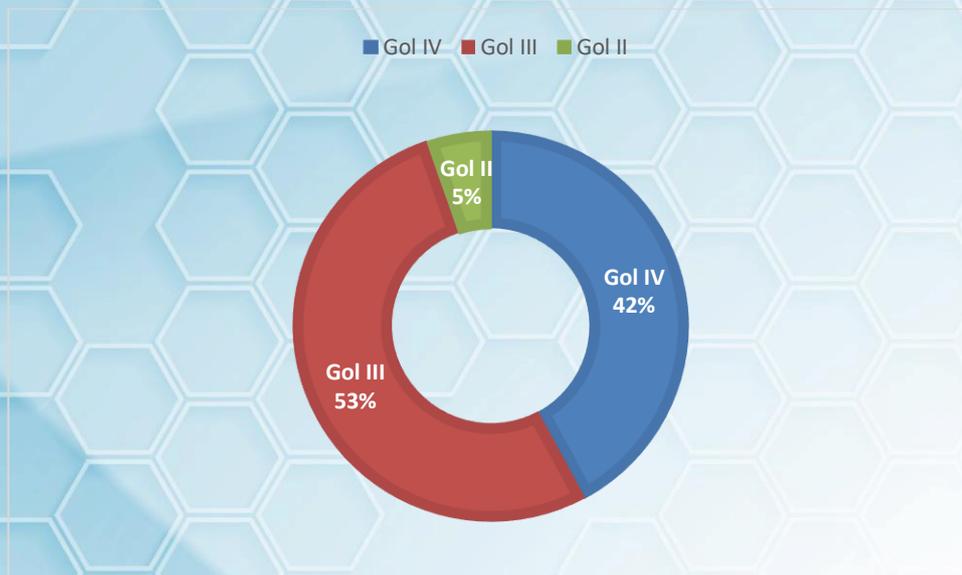
Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 berjumlah 54 orang, yang terdiri atas 38 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN), 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 3 orang Pegawai Jasa Langsung Perseorangan, yang tersebar di 6 Tim Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Tim Kerja Investasi sebanyak 8 orang; Tim Kerja Pelayanan dan Kemitraan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Pembiayaan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Kewirausahaan 7; Tim Kerja Kelembagaan sebanyak 8 orang; dan Tim Kerja Dukungan Manajerial sebanyak 12 orang.



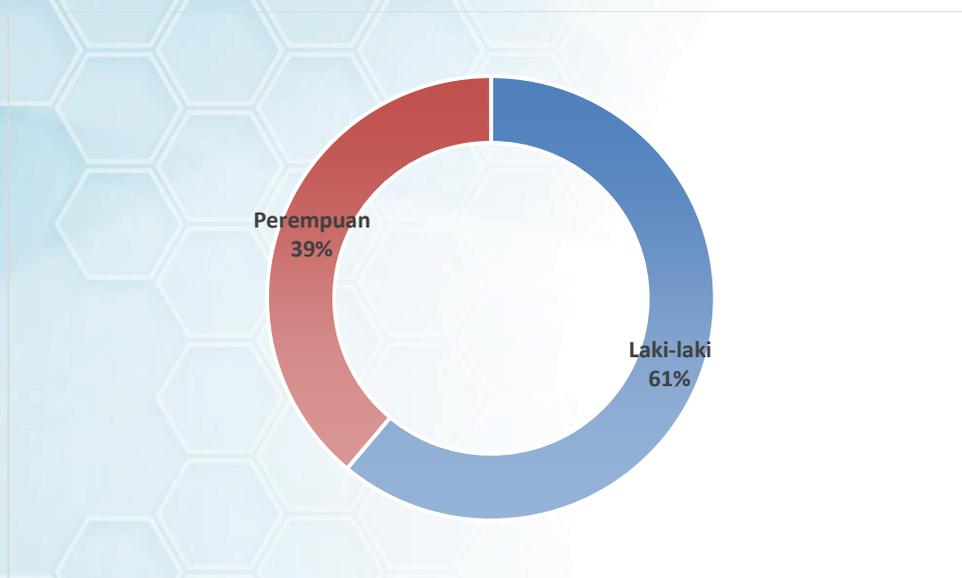
Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 16 orang, golongan III sebanyak 20 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak pada golongan III, yakni 53%.



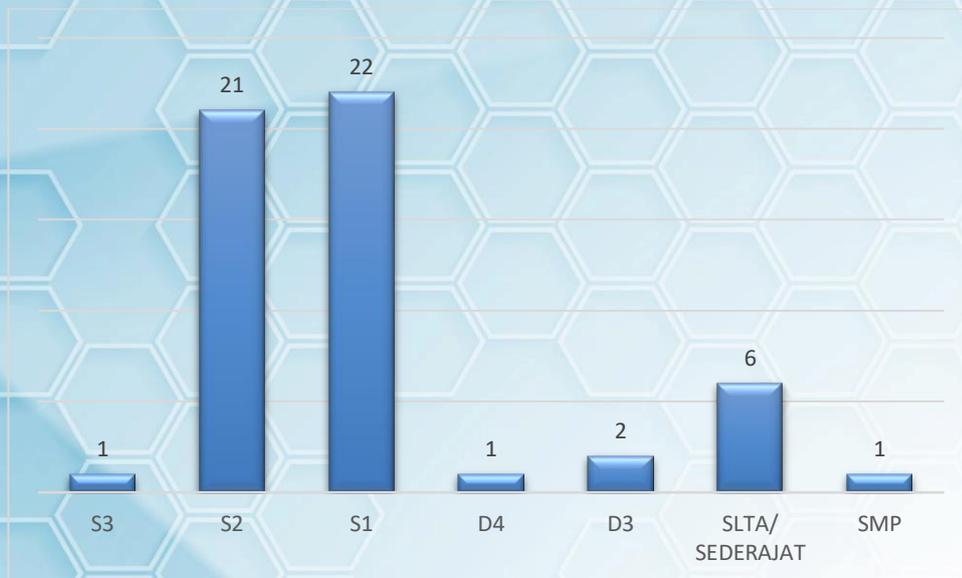
Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 28 orang, atau 55% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau 45% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha.



Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 21 orang, S1 sebanyak 22 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 6 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak dengan tingkat pendidikan S1, yakni mencapai 41%.



Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk mengimbangi permintaan masyarakat dunia yang terus meningkat terhadap produk ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian. Pasca pandemi Covid-19 juga masih berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini turut mempengaruhi laju pertumbuhan investasi dan pembiayaan, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2024, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan III 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan III Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan III Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Pemberdayaan Usaha, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSPKP/2021. Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 tersebut disusun sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk pembangunan nasional 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Visi tersebut tidak lain merupakan Visi Presiden tahun 2020-2024 yang juga diacu sebagai Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

2.1.2 Misi

Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan Misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun

2020-2024 serta mendukung 5 (lima) Program Utama Presiden yang disampaikan dalam Pidato Pelantikan tanggal 9 Oktober 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dari 4 (empat) Misi Presiden yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dapat mendukung 2 (dua) misi yaitu: **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing serta Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.**

2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, Ditjen PDSPKP merumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya investasi kelautan dan perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai investasi kelautan dan perikanan dari Rp5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2023;
 - b. meningkatnya pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan pembiayaan usaha Ke laut dan Perikanan melalui kredit program dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp7,3 Triliun pada tahun 2023;
 - c. meningkatnya nilai kinerja logistik hasil perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai kinerja logistik hasil perikanan dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;

- d. meningkatnya volume produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan volume produk olahan kelautan dan perikanan dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024;
 - e. meningkatnya konsumsi ikan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan konsumsi ikan dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024;
 - f. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024.
2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP, dengan tujuan:
- a. meningkatnya nilai PM PRB Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai PM PRB Ditjen PDSPKP dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
 - b. meningkatnya nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA Ditjen PDSPKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

2.1.4 Sasaran

Sasaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen.

Adapun sasaran tersebut adalah:

- 1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - a. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai investasi kelautan dan perikanan meningkat dari Rp 5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
- 2) Kinerja logistik hasil perikanan meningkat dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
- 3) Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program meningkat dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024.

b. Sasaran: Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PDSPKP meningkat 4 (skala 1-5) pada tahun 2020 menjadi 5 (skala 1-5) pada tahun 2024.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a. Sasaran: Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing meningkat dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024.

b. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai ekspor hasil perikanan meningkat dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024;
- 2) Konsumsi ikan meningkat dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024.

c. Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024.

3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 produk pada tahun 2024;
- 2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
- 3) Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP berada pada level 3 setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 4) Nilai kinerja PM PRB Ditjen PDSPKP meningkat dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP meningkat dari A (84) pada tahun 2020 menjadi A (86,69) pada tahun 2024;
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 7) Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP sebanyak 2 unit setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik (92) pada tahun 2024;
- 9) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP sebesar 1% setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 10) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;

- 11) Batas tertinggi prosentasi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP bernilai 1 (satu) setiap tahunnya pada tahun 2020- 2024.

2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan KKP ke-3 yaitu membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Ditjen PDSPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
3. Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan
4. Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
5. Meningkatkan konsumsi ikan
6. Meningkatkan ekspor hasil perikanan

Dalam melaksanakan 6 (enam) arah kebijakan di atas, Ditjen PDSPKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Di samping itu, Ditjen PDSPKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah:

1. Arah kebijakan “meningkatkan investasi kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
 - a. promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan. Langkah operasional untuk mendukung strategi ini adalah terlaksananya promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
 - b. Tersedianya peluang investasi yang *Ready to Offer*. Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut:

- 1) Identifikasi peluang usaha dan investasi dan
 - 2) penysunan profil peluang investasi.
2. Arah kebijakan “meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. Fasilitasi kemitraan usaha. Strategi ini dilakukan dengan cara mengembangkan kemitraan usaha, serta fasilitasi pelaku usaha untuk mengakses CSR/PKBL. Langkah-langkah pengembangan kemitraan:
 - 1) Identifikasi pelaku dan permasalahannya;
 - 2) Fasilitasi kemitraan usaha; dan
 - 3) Pendampingan dan monitoring.
 - b. Fasilitasi akses pembiayaan. Kendala utama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan diantaranya yaitu: (1) adanya gap informasi pembiayaan, akibat kurangnya informasi akses pembiayaan di sisi pelaku usaha, dan minimnya informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan; dan (2) Rendahnya literasi keuangan, dimana sebagian besar pelaku usaha kelautan perikanan memiliki literasi keuangan yang rendah.
Langkah operasional fasilitasi akses pembiayaan meliputi:
 - 1) penjaringan calon debitur potensial,
 - 2) peningkatan kelayakan usaha,
 - 3) sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan,
 - 4) pendampingan manajemen usaha,
 - 5) peningkatan literasi keuangan, dan
 - 6) pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*).
 - c. Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA). Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
 - 1) Rapat kerja teknis tenaga pendamping usaha; dan
 - 2) Pembinaan tenaga pendamping usaha .
 - c. Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan. Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
 - 1) Penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan wirausaha;
 - 2) Pembentukan dan penguatan inkubator bisnis; dan
 - 3) Penguatan kelembagaan kelompok menjadi koperasi.

d. Fasilitasi digitalisasi usaha. Secara prinsip, digitalisasi usaha adalah mengubah pola komunikasi, interaksi, dan fungsi-fungsi yang ada dalam usaha menjadi digital. Hal ini bersinergi dengan perizinan online karena menumbuhkan bakat dan minat pelaku usaha untuk berinteraksi secara online. Digitalisasi ini mendukung misi Presiden terkait struktur ekonomi produktif dan berdaya saing menyongsong Revolusi Industri 4.0. Manfaat digitalisasi usaha adalah kerja lebih cepat, efektif, tenaga kerja sedikit, dan jangkauan pelanggan lebih luas.

Langkah-langkah untuk mendorong digitalisasi usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah:

- 1) pembinaan pemanfaatan teknologi digitalnya;
- 2) membangkitkan ketertarikan bermedia sosial yang sehat;
- 3) bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi bisnis yang ada;
- 4) fasilitasi penyiapan desain website yang menarik (*mobile friendly*);
- 5) inovasi produk selalu diperhatikan;
- 6) pembinaan cara berinteraksi dan memberi pelayanan di media sosial;
- 7) responsif terhadap keluhan pelanggan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja pada Triwulan III mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru tentang penetapan indikator kinerja pada setiap level. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Pemberdayaan Usaha

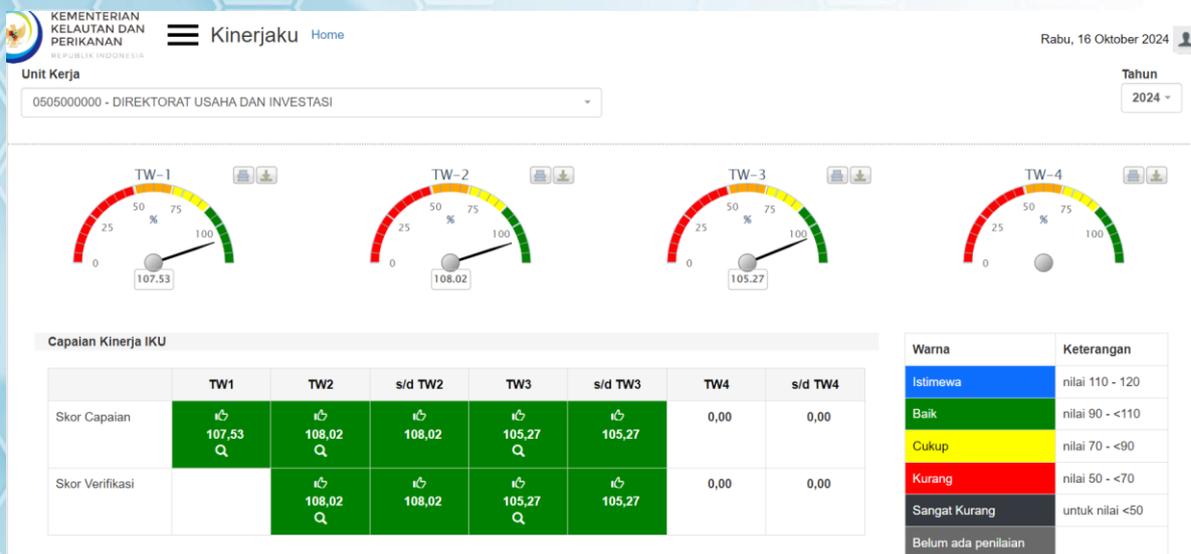
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
		2.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2.	Tersedianya dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	3.	Dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i> (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
3.	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4.	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	4
4.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	5.	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	45
5.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	6.	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	875
		7.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	2.565
		8.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)	125
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	9.	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	10.770
7.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	10.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		11.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87
		12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	84
		13.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	100
		14.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	80
		15.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1
		16.	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94
		17.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	93,75

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2024 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2024 sebesar 105,27%.

Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Tahun 2024 menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan III Tahun 2024, terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2024

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
		2024	TW III	TW III	Sd TW III	% thd Target TW III	% sd thd Target 2024
1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5	-	-	-	-	-
2	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8	-	-	-	-	-
3	Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	4	2	2	2	100	50
4	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	4	3	3	3	100	75
5	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	45	26	26	26	100	57,78
6	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina	875	650	650	650	100	74,28
7	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi Pemberdayaan Usaha	2565	1550	1473	1473	95,03	57,42
8	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir	125	96	75	75	78,13	60
9	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan	10770	6860	9237	9237	134,7	85,76
10	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari	75	-	-	-	-	-

	Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)						
11	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87	-	-	-	-	-
12	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	84	-	-	-	-	-
13	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	100	-	-	-	-	-
14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	80	80	100	100	120	120
15	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1	-	-	-	-	-
16	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	133,3	133,3	120	120
17	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	93,75	-	-	-	-	-

3.2.1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan

IK1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan profit atau

keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) selalu berupaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, Penangkapan Ikan Terukur dan program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Nilai persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi, termasuk dalam *outcome* yang harus dicapai Direktorat Pemberdayaan Usaha, dengan nilai persentase sebesar 5%. Nilai tersebut diperoleh dari persentase selisih pelaku usaha yang melakukan investasi pada tahun sebelumnya dengan tahun ini. Capaian tersebut baru dapat dihitung pada Triwulan IV, hal ini dikarenakan penilaian terhadap persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi baru dilakukan pada akhir tahun.

Untuk memenuhi capaian tersebut pada triwulan III Tahun 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka percepatan peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi. Rapat dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, rapat dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja lingkup Usaha Direktorat Pemberdayaan Usaha. Tujuan dilaksanakannya rapat adalah untuk menghitung capaian indikator jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada periode berjalan. Pada rapat ini, Direktur Usaha dan Investasi menyampaikan arahan dalam rangka percepatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan untuk triwulan selanjutnya dan mengevaluasi kinerja investasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3. 2 khtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi terhadap Target	Persentase Realisasi s.d TW II
-------------------	--------	-----------	--------------------------------------	--------------------------------

	TW II 2024	TW IV 2023	TW I I2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW I 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	terhadap target 2024
Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	-	5	-	5	-	24,45	-	-	-	-	-	-



Gambar 3. 2 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

IK2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

Indikator kinerja ini menunjukkan persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), dan skema pembiayaan kredit program lainnya, yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank kepada UMKM hasil kelautan dan perikanan.

Peningkatan pelaku Usaha KP yang mendapatkan kredit program periode tahun 2024 adalah akumulasi pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program periode bulan Januari-Desember 2024. Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung realisasi pertumbuhan debitur kredit program pada periode tahun berjalan dengan periode tahun sebelumnya (*year on year*). Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 8%. Untuk memenuhi capaian tersebut pada triwulan II 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang mendapatkan/merealisasikan pembiayaan kredit program di sektor kelautan dan perikanan. Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 April 2024 di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, hadir sebagai pimpinan rapat perhitungan persentase tersebut adalah Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh

Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk membahas capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program pada periode berjalan.

Tabel 3. 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW II terhadap target 2024
	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW I 2024	TW II 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	-	8	-	8	-	9,37	-	-	-	-	-	-



Gambar 3. 3 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

3.2.2. Sasaran Strategis 2

Tersedianya Peluang Investasi Yang Ready to Offer

IK3. Peluang investasi Yang Ready to Offer

Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas, dimana dokumen tersebut sudah siap ditawarkan kepada calon investor (*ready to offer*) karena telah dianalisa tingkat kelayakan investasinya, minimal ditinjau dari aspek (i) legalitas; (ii) finansial; (iii) teknis produksi dan operasional; (iv) sosial ekonomi. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan (i) identifikasi

lokasi/kawasan potensial; (ii) Koordinasi dan pembahasan konsep kajian; (iii) penyusunan dokumen peluang investasi yang ready to offer oleh Tim Konsultan; (iv) FGD pengayaan data dan informasi di daerah, dan (v) pendampingan.

Tabel 3. 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang Ready to Offer Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	
Peluang investasi yang ready to offer	2	3	-	4	2	3	-	2	100	50	-	50

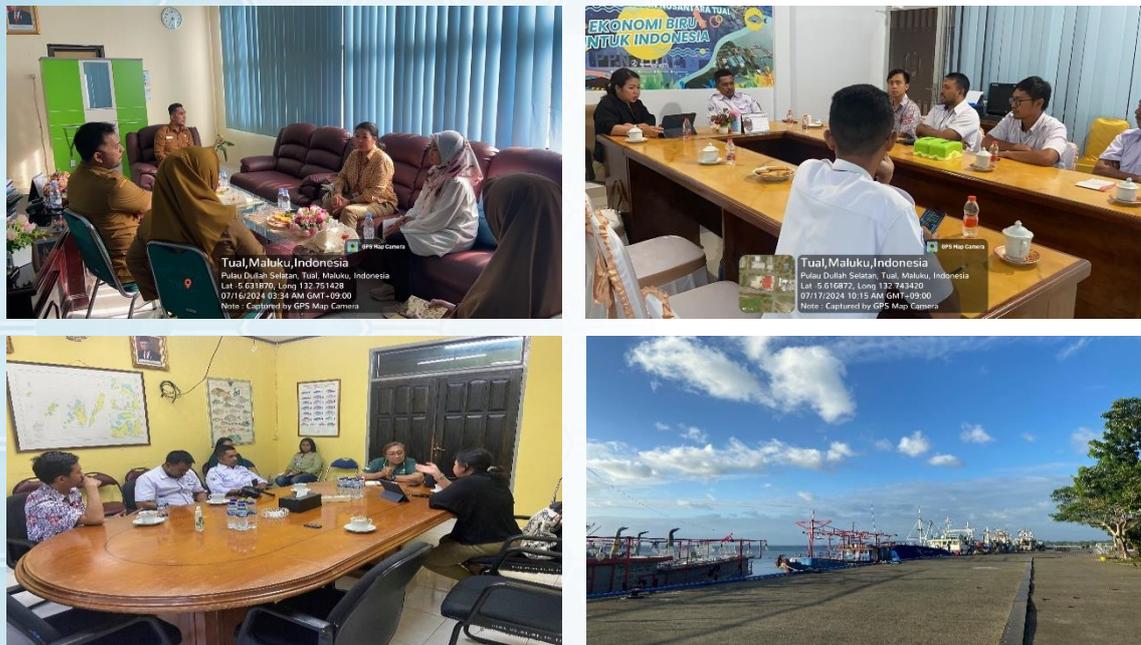
Penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* pada triwulan III tahun 2024 telah tercapai 2 (dua) dokumen peluang investasi yang *ready to offer* atau mencapai 100% dari target triwulan III tahun 2024, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 4 dokumen maka persentase capaian Indikator Kinerja Peluang Investasi *ready to offer* baru mencapai 50%.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP antara lain:

- Identifikasi dan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Kota Tual, Provinsi Maluku.
 - Kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang investasi di Kota Tual, Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Juli 2024 melalui koordinasi ke beberapa instansi dan *stakeholder* terkait di Provinsi Maluku dan Kota Tual, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dinas Perikanan Kota Tual, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, dan PT Samudera Indo Sejahtera (SIS). Kunjungan ke instansi dan *stakeholder* terkait bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sektor kelautan dan perikanan; mengetahui perkembangan modelling PIT di Zona 3; serta pemetaan peluang investasi kelautan dan perikanan;
 - Kota Tual memiliki infrastruktur yang relatif lengkap untuk mendukung Modelling PIT Zona 3 dan hilirisasi perikanan, yaitu berupa akses jalan yang memadai, sumber daya listrik dan air bersih dengan kapasitas cukup,

pelabuhan siap ekspor, sumber daya alam, dan kesiapan SDM. Kota Tual terletak diantara 3 WPP yaitu 718, 714 dan 715 yang berimbas pada melimpahnya hasil tangkapan ikan di zona tersebut;

- Dinas Perikanan Kota Tual tidak memiliki lahan untuk pengembangan industri perikanan. Penumbuhan industri perikanan lebih diarahkan kepada lokasi PPN Tual dan PP Tual yang memiliki infrastruktur memadai;
- Lahan yang representatif dan *clean and clear* untuk ditawarkan kepada calon investor ada di PPN Tual seluas 8 Ha. Kematangan lahan siap dibangun dengan kerjasama atau perjanjian kontrak yang dapat ditawarkan kepada investor;
- PT SIS memiliki kemampuan yang cukup sebagai pelaksana utama Modelling PIT di Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga dapat dioptimalkan untuk menjadi bapak angkat bagi pelaku usaha yang lain untuk menumbuhkan ekosistem bisnis kelautan dan perikanan yang sehat;
- Jenis peluang usaha dan investasi yang direkomendasikan dibangun di Kota Tual antara lain: gudang rumput laut di Kota Tual, kapal pengumpul di Kota Tual, serta pabrik es, docking kapal, pengembangan unit pengolahan ikan, dan pembangunan sentra kuliner di PPN Tual;



Gambar 3. 4 Identifikasi dan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Kota Tual, Provinsi Maluku.

2. Identifikasi dan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku

- Kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2024 melalui koordinasi dengan beberapa instansi dan stakeholder terkait di Kabupaten Maluku Tenggara, antara lain Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dan Koperasi Tani Nelayan (Koptanel) Elomel, serta kunjungan ke lokasi modelling rumput laut, lokasi yang ditawarkan untuk investasi industri rumput laut dan gudang penyimpanan rumput laut milik Koperasi Elomel;
- Kabupaten Maluku Tenggara memiliki infrastruktur distribusi dan ekspor yang lengkap, yaitu berupa : jalan, bandara, pelabuhan dan fasilitas lainnya;
- Kondisi alam dan perairan Kabupaten Maluku Tenggara sangat mendukung untuk budi daya rumput laut dimana saat ini sudah dilakukan budidaya rumput laut, terutama jenis *Eucheuma cottonii*, dan pemasaran rumput laut kering ke beberapa wilayah di Indonesia;
- Pelaku usaha budidaya dan pemasaran rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara sudah cukup mapan sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan. Sebagian besar pembudidaya rumput laut sudah bergabung dalam koperasi;
- Koptanel Elomel sebagai penerima dan pengelola bantuan Modelling Budi Daya Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara berdiri sejak tahun 2007 dengan anggota mencapai 1.000 petani budi daya rumput laut yang tersebar di 12 desa, namun saat ini anggota koperasi dibatasi 250 orang, memiliki 12 pos gudang penyimpanan rumput laut kering ukuran 3x4 yang tersebar di 12 kampung budi daya;
- Modelling Bisnis Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara sangat prospektif untuk dikembangkan. Jenis peluang usaha dan investasi yang direkomendasikan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, antara lain : gudang rumput laut, rumah pengering dan pabrik olahan rumput laut;



Gambar 3. 5 Identifikasi dan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku

3. Penyampaian Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Industri Pengolahan Ikan Terintegrasi di Kota Tual, Provinsi Maluku

- Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 19 September 2024 di Ruang Wisma Gracilaria bertujuan untuk penyampaian laporan pendahuluan, pembahasan dan pengayaan data dan informasi awal serta rencana survei lapang dan *benchmarking*;
- Hasil pembahasan dan rekomendasi perbaikan laporan pendahuluan sebagai berikut:
 - 1) Kajian ini diharapkan dapat sebagai acuan dan referensi dalam menyusun konsep grand desain Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Dikarenakan keterbatasan lahan target investasi maka usulan penentuan jenis investasi perlu dianalisa berdasarkan nilai pembobotan karena keterbatasan lahan;
 - 3) Koreksi kebutuhan data PPN adalah Jumlah dan kapasitas kapal yang bersandar/ berlabuh (data series);
 - 4) Referensi kawasan ekonomi perlu diperbanyak;
 - 5) Literasi perlu diperbanyak, terutama terkait PIT dan 11 potensi jenis usaha;
 - 6) Metodologi perlu dirinci dan diperjelas metode yang digunakan untuk menganalisa kelayakan dari kelima aspek;

- 7) Beberapa lokasi target *benchmarking*, antara lain PPS Nizam Zachman, kawasan usaha dan/atau kawasan berikat di Jabodetabek, Pelabuhan Perikanan Indramayu;
- 8) Arah peluang investasi nanti yang disusun diharapkan dapat bersinergi dan bermitra dengan UPI eksisting, seperti PT. SIS, PT. Matahari Sukses Abadi, dan CV. Adfani Bintang Samudera



Gambar 3. 6 Kegiatan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Industri Pengolahan Ikan Terintegrasi di Kota Tual, Provinsi Maluku

4. Survei dan FGD Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Industri Pengolahan Ikan Terintegrasi di Kota Tual, Provinsi Maluku

- Kegiatan survei/kunjungan lapangan dan FGD di Kota Tual, Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 22 – 27 September 2024 dengan tujuan observasi kondisi lapangan eksisting, pendampingan survei lapang oleh tim ahli penyusun dokumen peluang investasi, koordinasi dengan Pemerintah Kota Tual terkait penetapan lokasi target investasi, serta sinkronisasi data antar instansi di daerah;
- Pengumpulan data dilakukan koordinasi ke beberapa instansi dan stakeholder terkait yaitu BAPPEDA Kota Tual, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), PLN, PDAM, PT Samudera Indo Sejahtera, CV Adfani Bintang Samudera;
- Kota ini mempunyai Potensi Lahan Budidaya Laut sebesar 5.548 Ha, dimana baru dimanfaatkan sebanyak 750,82 Ha atau 13,53%. Produksi perikanan Kota Tual dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni dari 28,74 ribu ton pada tahun 2020 menjadi 30,12 ribu ton pada tahun 2023. Adapun hingga semester 1 tahun 2024 mencapai 12,43 ribu

ton. Komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi dan layak ditawarkan ke calon investor yaitu berbagai jenis ikan, teripang, mutiara, rumput laut, dan telur ikan terbang. PPN Tual sebagai rencana lokasi UPI yang akan ditawarkan sudah memiliki AMDAL. Jika nantinya akan dibangun suatu industry, maka perlu menyusun dokumen izin lingkungan;

- Dari hasil kunjungan dan pembahasan dalam FGD disimpulkan bahwa lahan yang diusulkan sebagai lokasi target investasi perikanan di Kota Tual, yaitu (a) Lahan di kawasan PPN Tual seluas 8 Ha, dengan status lahan milik PPN Tual; (b) Pemkot Tual siap mendampingi dan membantu calon investor untuk mewujudkan investasinya di Kota Tual, mulai dari segi izin usaha, lingkungan, serta pendampingan teknis lainnya; (c) Alternatif lokasi lain : Pulau Kur, Pulau Tayando, dan kawasan Luv; (d) PPN Tual siap menyambut kedatangan investor dalam rangka mendukung PIT, baik melalui seluruh fasilitas eksisting yang dimiliki PPN Tual saat ini, maupun dengan rencana pengembangan tahun depan, seperti : pembangunan doking kapal, pelatihan SDM, dan rencana penambahan kuota BBM;



Gambar 3. 7 Survei dan FGD Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Industri Pengolahan Ikan Terintegrasi di Kota Tual, Provinsi Maluku

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp545.951.874,- atau setara dengan 48,44% dari total pagu sebesar Rp1.126.953.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari 48,44% anggaran yang telah terealisasi, telah dicapai realisasi indikator kinerja sebesar 50%.

3.2.3 Sasaran Strategis 3

Terlaksananya promosi udaha dan investasi

IK4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Tahapan kegiatan meliputi (i) pemetaan data potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan; (ii) promosi peluang investasi usaha kelautan dan perikanan; dan (iii) pendampingan investasi. Kegiatan Fasilitasi Promosi Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk: (i) Mempromosikan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan kepada pelaku usaha/calon investor; (ii) Fasilitasi *Investment matching* antara *G to B* yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dengan calon investor dan *B to B* antara perusahaan dengan calon investor.

Tabel 3. 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan III 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Promosi Usaha dan Investasi KP (Kegiatan)	3	3	-	4	3	3	3	3	100	100	-	75

Pencapaian kegiatan promosi usaha dan investasi KP pada triwulan III 2024 sebanyak 3 kegiatan dengan persentase 75% dari target tahun 2024. Kegiatan promosi investasi usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan III 2024 sebagai berikut:

1. Keikutsertaan pada kegiatan Indo Fisheries Expo & Forum 2024
 - Kementerian Kelautan dan Perikanan, memamerkan berbagai produk perikanan unggulan serta inovasi dan teknologi perikanan pada pameran skala internasional Indo Fisheries 2024 Expo & Forum yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 17-19 Juli 2024. Event akbar ini menghadirkan 580 peserta dari 40 negara dan kembali mempertemukan berbagai stakeholder untuk saling berbagi informasi mengenai perkembangan sektor kelautan dan perikanan. Pameran yang diadakan termasuk menampilkan 12 paviliun negara-negara besar dunia seperti Belanda, Cina, Eropa, India, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Spanyol, Taiwan, Vietnam,

Italia, dan termasuk Indonesia. Pameran ini bersifat *business to business* dan menjadi bagian dari penguatan brand seafood Indonesia;

- Melalui pameran ini, Ditjen PDSPKP berharap para profesional di industri seafood dan calon buyer yang berkunjung bisa menjajaki kemitraan dagang dan investasi dengan asosiasi dan eksportir Indonesia. Selain itu masyarakat juga bisa melihat lebih dekat perkembangan inovasi produk dan teknologi perikanan, khususnya tambahan pangan bergizi dalam bentuk hidrolisat protein ikan (HPI) yang akan difortifikasi ke jajanan pasar;
- Direktorat Jenderal PDSPKP menyambut baik upaya stakeholder dalam membuat event expo perikanan internasional seperti Indo Fisheries yang strategis dalam mempromosikan citra perikanan Indonesia. Sektor perikanan sangat berpengaruh pada ketahanan pangan Indonesia. Salah satu implementasi program Ekonomi Biru adalah meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan, termasuk pengolahan. Ketahanan pangan tidak akan lepas dari industri perikanan.



Gambar 3. 8 Keikutsertaan pada kegiatan Indo Fisheries Expo & Forum 2024

2. Pendampingan Minat Investasi Komoditas Rumput Laut dengan PT Indorama

- Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Juli 2024 di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas monitoring rencana investasi dan kebutuhan data investasi rumput laut yang akan dilakukan oleh PT Indorama;
- PT Indorama memiliki minat investasi usaha rumput laut terintegrasi dari hulu ke hilir dengan komoditas rumput laut yaitu *Ulva sp.* dan *E. cottonii*. Rencana

produk usaha pengolahan yaitu : karagenan, bio stimulant, dan bio degradable plastic;

- Pola budidaya rumput laut akan dilakukan di darat sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas dan dekat dengan laut. Kebutuhan lahan PT Indorama seluas 100 ha. PT Indorama telah difasilitasi dan berkunjung ke Wakatobi untuk menilai kelayakan peluang investasi rumput laut dan butuh pendampingan investasi lebih lanjut. PT Indorama meminta usulan lokasi alternatif di Sulawesi Selatan;
- Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melakukan kunjungan lapang terhadap lahan calon industri rumput laut di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Takalar dan Jeneponto yang memiliki potensi pengembangan industry rumput laut dan dapat direkomendasikan kepada calon investor. Status lahan clean and clear milik masyarakat dan sudah tersedia eksisting pembudidaya rumput laut. Lokasi tersebut membuka peluang untuk bermitra dengan masyarakat setempat. Rencananya, Indorama akan membangun budidaya rumput laut sendiri, namun KKP menghimbau agar PT Indorama dapat bekerjasama dengan pembudidaya lokal;



Gambar 3. 9 Pendampingan Minat Investasi Komoditas Rumput Laut dengan PT Indorama

3. Pendampingan Minat Investasi PT Krueng Triton Indonesia dengan Thani Invesment dan Abu Dhabi Invesment Company

- Rapat ini dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Juli 2024 secara hybrid, yaitu luring di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha dan daring melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui profil peluang investasi yang ditawarkan PT. Krueng Triton Indonesia, peninjauan kerja sama investasi serta kebijakan investasi Pemda setempat;

- Perwakilan PT. Krueng Triton Indonesia berdiskusi informal dengan perwakilan Thani Invesment terkait peluang kerja sama investasi dan menyampaikan profil umum peluang investasi yang ditawarkan yaitu (a) Industri Pengalengan Tuna nilai potensi investasi mencapai USD 18,257,859,90 produk yang akan dihasilkan dari proyek ini antara lain tuna kaleng, collagen powder, dan fish oil; (b) Industri Udang Terintegrasi nilai potensi investasi mencapai USD 15.015.251,77 produk yang akan dihasilkan dari proyek ini antara lain frozen raw peeled and deveined shrimp, cooked peeled dan deveined shrimp, dan chitosan powder;
- Perwakilan dari Thani Invesment dan Abu Dhabi Invesment Company menyampaikan bahwa mereka berminat terhadap tawaran kerja sama investasi yang disampaikan PT. Krueng Triton Indonesia. Thani Invesment telah merealisasikan kerja sama investasi di Indonesia senilai USD 400 juta (contoh kasus di Kab. Bogor), sedangkan Abu Dhabi Invesment Company baru akan mulai masuk ke Indonesia tahun ini;



Gambar 3. 10 Pendampingan Minat Investasi PT Krueng Triton Indonesia dengan Thani Invesment dan Abu Dhabi Invesment Company

4. Audiensi dan Pendampingan Minat Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan dengan Yantian District, Tiongkok
 - Rapat Audiensi dan Pendampingan Investasi dilaksanakan pada 5 September 2024 di RR. Mutiara Ditjen PDSPKP yang dipimpin oleh Direktur Pemasaran yang didampingi oleh Katimja Investasi dan Katimja Akses Pasar Luar Negeri dan dihadiri oleh delegasi dari Yantian District China;

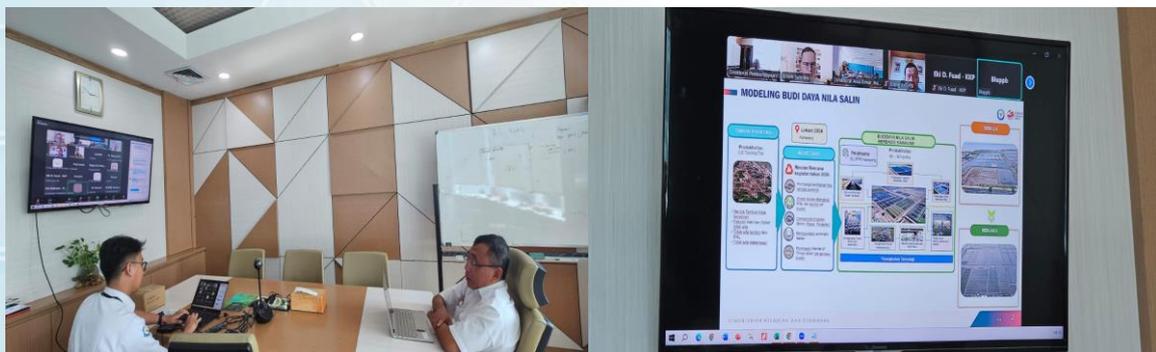
- Yantian District adalah salah satu dari sembilan distrik yang berada di Kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Distrik ini dikenal sebagai kawasan pelabuhan dan pusat logistik yang sangat penting di wilayah pesisir selatan Tiongkok. Pelabuhan Yantian adalah salah satu pelabuhan kontainer terbesar di barat China, yang memainkan peran penting dalam perdagangan internasional Tiongkok. Pelabuhan ini menjadi gerbang ekspor-impor utama untuk banyak barang terutama seafood. Distrik ini menjadi bagian penting dari Zona Ekonomi Khusus Shenzhen yang didirikan oleh pemerintah Tiongkok untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi asing;
- Distrik Yantian sudah melakukan Investasi Cold Storage di PIK 2 dengan kapasitas 10.000 Ton, untuk selanjutnya pihak yantian meminta informasi lokasi untuk investasi pembangun Cold Storage dengan nilai investasi 5 M Yuan Tiongkok (RMB);
- Delegasi Yantian Distrik mengundang Pemerintah dan Pengusaha sektor KP Indonesia untuk berkunjung dan berinvestasi di Yantian Distrik untuk bersama-sama memajukan sektor kelautan dan perikanan. Direktur Pemasaran menyampaikan rencana kerjasama terkait dengan ekspor komoditas Indonesia ke China dengan mudah (Fast Track Beacukai dan karantina). Calon investor di Yantian dapat mengikuti Indonesia Marine Business Forum dan Business Matching yang akan diadakan KKP tahun depan dan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM;
- Kedua pihak sepakat bahwa terdapat potensi besar untuk memperkuat kerja sama, terutama dalam hal transfer teknologi perikanan, peningkatan ekspor produk laut, serta pertukaran pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya kelautan



Gambar 3. 11 Audiensi dan Pendampingan Minat Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan dengan Yantian District, Tiongkok

5. Audiensi dan Pendampingan Minat Investasi Komoditas Nila Salin dengan D42 Group, Dubai

- Rapat Audiensi dan Pendampingan Investasi dilaksanakan pada 19 September 2024 di melalui zoom meeting yang dipimpin oleh Direktur Promosi Asia Timur, Kementerian Investasi / BKPM, dengan dihadiri perwakilan dari KKP yaitu Direktur Pemberdayaan Usaha – Ditjen PDSPKP dan Direktur Air Tawar – Ditjen Budi Daya, serta perwakilat Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Direktorat Air Payau, serta Mr. Artem - perwakilan dari D42 Group
- D42 Group adalah perusahaan asal Dubai yang bergerak dalam bidang FMCGs (Fast-moving consumer goods). D42 Group menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki kerjasama dibidang budidaya Nila Salin dengan BLU Karawang yang merupakan UPT dari Ditjen Budi Daya, KKP.



Gambar 3. 12 Audiensi dan Pendampingan Minat Investasi Komoditas Nila Salin dengan D42 Group, Dubai

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp2.030.042.360,- atau setara dengan 89,96% dari total pagu sebesar Rp2.256.532.000,-. Dalam hal ini persentase

penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 89,96%, hal ini dikarenakan penyesuaian target indikator kinerja utama akibat adanya *automatic adjustment* masih dalam tahap pengusulan kepada Sesditjen PDSPKP.

3.2.4 Sasaran Strategis 4

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan

IK5. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)

Dalam rangka memperkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Indonesia melalui pengembangan peran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pada tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 10/MEN-KP/KB/VIII/2021 dan 17/KB/M.KUKM/VIII/2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PDSPKP menindaklanjutinya dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bagi koperasi dan UMKM yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2021. Salah satu wujud sinergi program yang dilaksanakan yakni mendorong UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk dapat naik kelas melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, dari semula berbentuk kelompok usaha pengolah dan pemasar (Poklahsar) menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Diharapkan dengan terbentuknya koperasi maka poklahsar dapat mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan, memiliki kekuatan hukum sehingga dapat mengakses pembiayaan serta meningkatkan posisi tawar dalam bermitra dengan pelaku usaha lain.

Pada Indikator kinerja ini yang dimaksud Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya adalah Lembaga usaha yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan. Pada tahun 2024 kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan

dilakukan kepada lembaga usaha dengan kategori: 1) lembaga usaha non formal (kelompok pengolah dan pemasar) menjadi lembaga usaha formal/berbadan hukum, 2) lembaga usaha berbadan hukum namun perlu dilakukan penguatan kembali karena mendukung program tertentu seperti korporasi nelayan, klaster daya saing, kampung nelayan maju, kampung budidaya, Inkubator Mina Bisnis dan program lainnya.

Tabel 3. 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan III 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	
Lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya)	26	22	6	45	26	22	6	26	100	118,18	433,33	57,78

Target Lembaga usaha yang ditingkatkan dan dibina kapasitas kelembagaannya pada tahun 2024 sebanyak 45 lembaga, sedangkan target pada triwulan III tahun 2024 adalah sebanyak 26 lembaga. Realisasi capaian jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya pada triwulan III tahun 2024 adalah 26 lembaga usaha, hal ini sesuai target dan telah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka realisasi lembaga usaha hasil KP yang telah ditingkatkan sampai dengan triwulan III sebesar 57,78%. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2023 tercapai 118,18%. Adapun lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan III Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pada triwulan III, antara lain:

1. Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 10-12 Juli 2024
 - Rapat dilaksanakan di Pendopo Lurah Girikarto dihadiri oleh wakil dari Direktorat PU-KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. DIY, Lurah Girikarto, calon anggota dan pengurus koperasi, Pokdarwis, dan tokoh masyarakat.
 - Dalam rapat disampaikan bahwa Lurah Girikarto Bp. Sumardiyono menyambut positif rencana pembentukan koperasi. Dengan adanya koperasi ini

diharapkan menjadi berkah serta operasionalnya berjalan dengan lancar. Sebagai ilustrasi, keberhasilan koperasi di pantai Depok Bantul dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut.

- Maksud dan tujuan pendirian Koperasi di Pelabuhan Gesing yang merupakan bagian dari pembangunan pelabuhan Gesing untuk mempersiapkan SDM dan kelembagaan ekonomi yang mendukung aktifitas pelabuhan perikanan Gesing serta Kalurahan Girikarto secara umum.
- Koperasi dibagi menjadi simpan pinjam, pemasaran, produksi, konsumsi dan Jasa. Koperasi simpan pinjam hanya dapat melayani kegiatan simpan pinjam saja. Untuk saat ini dengan adanya aturan yang baru cukup sulit, karena adanya pembatasan jumlah modal. Hal ini untuk mensikapi penyalahgunaan koperasi bagi kegiatan-kegiatan pinjaman yang marak akhir-akhir ini. Oleh karena itu, maka direkomendasikan untuk rencana pendirian koperasi Gesing ini bukan berbentuk koperasi Simpan Pinjam (KSP), dengan nama koperasi yang telah disepakati adalah Koperasi Panjolo Karto Mukti.
- Saat ini, di pantai Pok Tunggal terdapat 2 kelompok pelaku usaha keripik ulva dengan anggota masing-masing 10 orang dan 3 kelompok lainnya di sepanjang pantai Baron, Indriyati, dan Ngobaran. Melalui kerjasama KKP dengan UNIDO melalui program Global Quality and Standart Programme Phase 2, kelompok usaha di Pok Tunggal telah difasilitasi pelatihan diversifikasi produk ulva menjadi mie kering, sabun, dan handbody. Ke depan, upaya tersebut perlu dihitung skala keekonomiannya serta potensi pasarnya sehingga dapat diproduksi secara massal.



Gambar 3. 13 Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 10-12 Juli 2024

2. Penyusunan Draft Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan Dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Ikan pada tanggal 15 Juli 2024

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap, USAID Ber-IKAN, Perwakilan Tim Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, dan Pelaksana Tim Kerja Kelembagaan-Direktorat Pemberdayaan Usaha.
- DJPT mengusulkan untuk menentukan subjek dan objek untuk konsep pedoman pendampingan Lembaga usaha dan mencari referensi untuk pedoman/ aturan yang sejenis agar tidak redundan.
- PT Breto Inovasi Indonesia menyarankan penekanan pada core bisnis usaha koperasi, apabila core bisnisnya jalan maka kelembagaannya kuat. Yang kemudian dilanjutkan ke tahapan pembinaan seperti lokakarya/bimtek, coaching, monitoring dan networking. Umumnya koperasi vacuum/tidak aktif karena tidak memiliki bisnis yang cocok.



Gambar 3. 14 Penyusunan Draft Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan Dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Ikan pada tanggal 15 Juli 2024

3. Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 16 Juli 2024

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 di ruang rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha GMB 3 lantai 12 dan secara hybrid melalui aplikasi zoom, yang dihadiri oleh Perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, penyuluh perikanan dan Penyuluh Koperasi, calon anggota Koperasi Pemasaran Pumpente Laingpatehi Bangkit, dan anggota Tim Kerja Kelembagaan-Direktorat Pemberdayaan Usaha.

- Rapat ini merupakan tindak lanjut Nota Dinas dari Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen DJPT kepada Direktur Usaha Investasi Ditjen PDSPKP perihal Pembentukan Koperasi Nelayan Terdampak Bencana Gunung Ruang, Provinsi Sulawesi Utara.
- Beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan koperasi yaitu (1) Latar belakang pembentukan koperasi adalah instruksi dari Menteri Kelautan dan Perikanan terkait bencana erupsi gunung ruang; (2) Terdapat 2 desa yang terdampak dan akan direlokasi ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; (3) Terdapat 110 nelayan yang belum terwadahi kelompok/Lembaga berbadan hukum; (4) Sudah berkoordinasi dengan DKP Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Utara sehingga minggu kemaren sudah didaftarkan terkait nama koperasi; (5) Sudah terdapat anggota koperasi dan (6) Rencananya akan mendapatkan kapal dan alat tangkap ikan untuk semua anggota koperasi.
- Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM, hari jumat dilakukan penandatanganan dengan notaris. SK Kemenkumhan rencananya akan selesai pada akhir juli atau awal agustus



Gambar 3. 15 Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan di Provisni Sulawesi Utara pada tanggal 16 Juli 2024

4. Penyusunan draft penilaian kinerja lembaga usaha pada tanggal 24 Juli 2024

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024 di ruang rapat Investasi GMB 3 lantai 15 KKP Gambir Jakarta Pusat secara hybrid. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap, PT. Breto Inovasi Indonesia, USAID Ber-IKAN, Perwakilan Tim Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, dan Pelaksana Tim Kerja Kelembagaan-Direktorat Pemberdayaan Usaha.

- Pertemuan ini untuk menyusun lembar penilaian kinerja koperasi dengan mengambil gambaran awal dari hasil monitoring dan evaluasi koperasi yang sudah dibentuk Tahun Anggaran 2023.
- Kertas kerja penilaian yang memuat tentang indikator penilaian koperasi, dasar penilaian, alat ukur, dan bobot nilai serta kriteria penilaian. Di mana penilaian kinerja lembaga usaha terdiri beberapa kategori yaitu, badan usaha aktif, kinerja usaha yang semakin sehat, kohesivitas dan partisipasi anggota, orientasi pada pelayanan anggota dan dampak terhadap masyarakat.



Gambar 3. 16 Penyusunan draft penilaian kinerja lembaga usaha pada tanggal 24 Juli 2024

5. Koordinasi dalam rangka persiapan Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten pada tanggal 5 Agustus 2024

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 secara hybrid di ruang rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha GMB 3 lantai 12 Gambir. Kegiatan ini dihadiri oleh PT Breto Inovasi Indonesia, Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha dan koperasi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang merupakan binaan Direktorat Pemberdayaan Usaha
- Pertemuan ini membahas persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Subsektor Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari kriteria peserta, persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta dan fasilitasi yang disediakan oleh panitia.
- Target utama bimbingan teknis koperasi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran di Provinsi Jawa Barat dan Banten yang merupakan binaan

Direktorat Pemberdayaan Usaha tetapi dimungkinkan juga diperuntukan bagi UMKM dan Inkubasi Bisnis binaan Ditjen PDSPKP.

- Untuk efektivitas pelaksanaan bimbingan teknis, panitia menyampaikan kriteria peserta sebagai berikut: (1) Merupakan pengurus/pengelola koperasi; (2) Sehat jasmani dan rohani; (3) Batas maksimal usia 50 tahun; (4) Memahami penggunaan komputer dan disarankan untuk membawa laptop; (5) Dapat menyebarkanluaskan hasil bimtek kepada anggota koperasi; (6) Bersedia untuk mengisi form monitoring dan evaluasi setelah bimtek; (7) Membuat rencana usaha koperasi 3 bulan ke depan (format terlampir) yang disampaikan ke panitia paling lambat pada tanggal 8 agustus 2024; (8) Untuk membuktikan bahwa peserta merupakan pengurus/pengelola koperasi, peserta diwajibkan memberikan/membawa soft copy/salinan AK notaris pendirian/perubahan koperasi dan SK Kemenkumham koperasi



Gambar 3. 17 Koordinasi dalam rangka persiapan Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten pada tanggal 5 Agustus 2024

6. Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten pada tanggal 11-13 September 2024

- Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 11-13 September 2024 di Kota Bandung dengan dihadiri oleh 13 koperasi, 1 koperasi kalamo, 1 umkm naik kelas dan 3 inkubasi bisnis. Kegiatan juga dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan USAID Ber-IKAN. Kegiatan bimtek bekerja sama dengan PT. Breto Inovasi Indonesia sebagai narasumber/pelatih.

- Acara dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Usaha yang diawali dengan sambutan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, kemudian dilanjutkan oleh kegiatan inti pelatihan
- Kegiatan bimbingan teknis terdiri atas ceramah, kerja kelompok dan diskusi, interaktif peserta, tanya jawab dan games. Dalam kegiatan ini peserta mendapat 2 jenis sertifikat yaitu sertifikat kehadiran untuk seluruh peserta dan sertifikat kelulusan bagi peserta yang mendapat nilai minimal 70 untuk pos test. Dari 38 peserta, 22 orang peserta dinyatakan lulus (57,89%)



Gambar 3. 18 Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten pada tanggal 11-13 September 2024

7. Koordinasi dalam rangka persiapan Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 September 2024

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 September di ruang rapat Direktorat Logistik GMB 3 lantai 12 KKP Gambir Jakarta Pusat secara hybrid. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus dan pengelola Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, perwakilan Dinas Kelautan Perikanan terkait, PT. Breto Inovasi Indonesia, dan Pelaksana Tim Kerja Kelembagaan-Direktorat Pemberdayaan Usaha.
- PT Breto Inovasi Indonesia menyampaikan gambaran/panduan singkat terkait pengisian google form penyusunan rencana usaha yang merupakan syarat sebelum mengikuti Bimtek Penguatan Kelembagaan Usaha.

- Penyusunan rencana usaha bagi calon peserta bimtek akan digunakan untuk screening awal sehingga nantinya dapat menjadi bahan diskusi dalam bimtek terkait rencana dan masalah yang dihadapi koperasi.



Gambar 3. 19 Koordinasi dalam rangka persiapan Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 September 2024

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp700.280.685,- atau setara dengan 37,85% dari total pagu sebesar Rp1.850.000.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 57,78% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 37,85%.

3.2.5 Sasaran Strategis 5

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha

IK6. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)

Penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil KP dilaksanakan dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pembinaan terhadap wirausaha bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan rasio kewirausahaan serta keberlanjutan usaha wirausaha baru dan wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini terlaksananya fasilitas pendampingan dan pembinaan UMKM sektor hasil kelautan dan perikanan.

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dibina pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 875 wirausaha, pada triwulan III tahun 2024 target yang ditetapkan sebanyak 650 UMKM/wirausaha. Realisasi capaian pada TW III yaitu sebanyak 650 UMKM/Wirausaha atau setara dengan 100% terhadap target, nilai persentase capaian apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah sebesar 74,29%. Capaian kewirausahaan tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian di periode yang sama pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 85,71 %, dengan capaian wirausaha yang terealisasi sebanyak 350 UMKM.

Tabel 3. 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	
Wirausaha Hasil KP yang Ditumbuhkan dan Dibina (UMKM)	650	533	350	875	650	553	350	650	100	121,95	185,71	74,29

Untuk mendukung capaian tersebut, kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan III tahun 2024, meliputi:

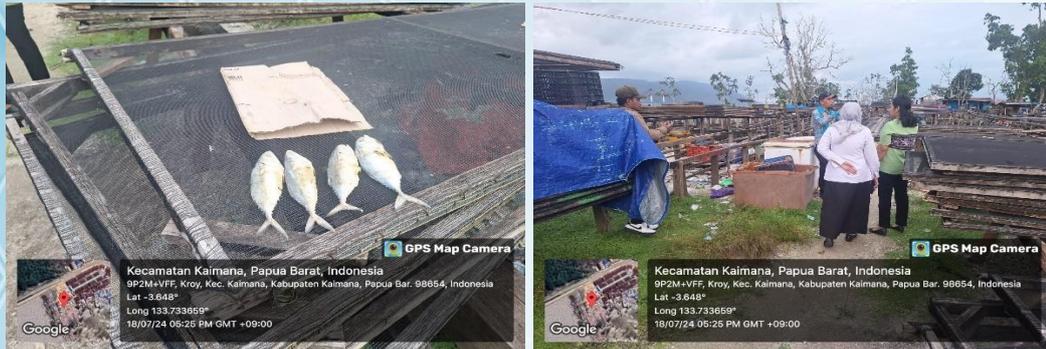
1. Pendampingan Wirausaha Hasil Kelautan dan Perikanan

- Kegiatan pendampingan wirausaha di Kota Blitar, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024. Bentuk pembinaan dilakukan kepada 11 UMKM wirausaha perikanan. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk mendorong UMKM untuk dapat memperbaiki manajemen usaha sehingga dapat meningkatkan produksi serta meningkatnya omeset UMKM tersebut.



Gambar 3. 20 Kegiatan pendampingan wirausaha di Kota Blitar

- Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Kaimana, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 - 20 Juli 2024. Bentuk pembinaan dilakukan kepada 6 UMKM Perikanan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan untuk melihat kondisi UMKM binaan dan memberikan masukan yang diperlukan sebagai bahan perbaikan untuk pengembangan usaha agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas area pemasaran.



Gambar 3. 21 Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Kaimana

- Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Lebak, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Juli 2024. Bentuk pembinaan dilakukan kepada 28 UMKM hasil perikanan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan untuk mengetahui kondisi manajemen usaha yang diterapkan oleh UMKM. Dari hasil pelaksanaan kegiatan didapatkan hamper seluruh UMKM belum menerapkan manajemen usaha yang baik dan pengelolaan keuangan yang belum dipisah serta belum menerapkan manajemen stok yang baik, sehingga dapat mengganggu keberlanjutan usaha UMKM tersebut. Perlu adanya pembinaan terkait manajemen usah dan pengelolaan keuangan serta manajemen stok untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM di Kabupaten Lebak.



Gambar 3. 22 Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Lebak

- Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Jombang, dilakukan kepada 43 UMKM hasil perikanan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan untuk mengetahui proses bisnis UMKM. Dari kegiatan tersebut didapatkan bahwa pelaku usaha belum memiliki legalitas yang dapat menunjang kegiatan usaha UMKM tersebut. Dari sisi pengelolaan keuangan hanya Sebagian pelaku usaha yang sudah memisahkan laporan keuangan dengan keuangan rumah tangga. Perlu adanya pembinaan dari manajemen usaha dan pengelolaan keuangan.
- Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Kebumen dilakukan kepada 91 UMKM hasil perikanan pada tanggal 6 Agustus 2024. Tujuan dilaksanakannya kegiatan untuk mengetahui proses bisnis UMKM. Dari kegiatan tersebut didapatkan bahwa pelaku usaha belum memiliki sop dalam menjalankan manajemen usaha sehingga masih banyak pengelolaan keuangan yang masih tergabung dengan keuangan rumah tangga. Dari sisi permodalan masih banyak UMKM yang kesulitan dalam mengakses permodalan karena belum memiliki legalitas.
- Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Temanggung dilakukan kepada 70 UMKM hasil perikanan pada tanggal 13 September 2024. Tujuan dilaksanakannya kegiatan untuk melihat kondisi UMKM binaan dan memberikan masukan yang diperlukan sebagai bahan perbaikan untuk pengembangan usaha agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas area pemasaran.



Gambar 3. 23 Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Kebumen

2. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Pembiayaan

- Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI pada Triwulan II telah dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo

dan Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPR-RI, perwakilan pejabat dari Ditjen PDSPKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Setempat, Lembaga Keuangan Setempat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, dan praktisi yang menyampaikan success story menjalankan usaha dan memberikan motivasi kepada calon wirausaha kelautan dan perikanan. Hadir sebagai peserta adalah pelaku usaha yang terdiri atas pembudidaya ikan air tawar, nelayan, serta hasil perikanan setempat.

- Hasil dari pelaksanaan Bimtek Wirausaha dan Akses Pembiayaan yaitu terjangungnya calon wirausaha yang berminat untuk berusaha di sektor kelautan dan perikanan, sementara bagi UMKM eksisting diharapkan mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan. Pada kegiatan ini juga disediakan layanan perizinan oleh DPMPTSP setempat untuk memberikan pendampingan dalam pengajuan dan pengurusan NIB.



Gambar 3. 24 Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp4.353.065.762,- atau setara dengan 57,49% dari total pagu sebesar Rp7.572.500.000,- . Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran apabila dilihat dari besaran persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 74,21% yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran sebesar 57,49%.

IK7. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha adalah Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan intermediasi dalam kegiatan pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan, yang terdiri atas fasilitasi akses pembiayaan kredit program dan/atau fasilitasi pada pendampingan Gerai Investasi dan layanan usaha (GISELA) dan kegiatan pemberdayaan lainnya (fasilitasi kemitraan, perizinan dan kelembagaan).

Tabel 3. 8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	
UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	1550	-	-	2565	1473	-	-	1473	95,03	-	-	57,42

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 2.565 UMKM, pada triwulan III tahun 2024 target yang ditetapkan sebanyak 1550 UMKM. Realisasi capaian pada TW III yaitu sebanyak 1473 UMKM atau setara dengan 95,03% terhadap target, nilai persentase capaian apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 57,42%. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, karena formulasi penghitungan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Fasilitasi akses pembiayaan yang dilakukan berupa edukasi literasi keuangan dan pendampingan untuk menilai status kelayakan usaha UMKM dalam mengakses pembiayaan, baik ke lembaga keuangan bank ataupun nonbank di lokus-lokus prioritas KKP ditambah dengan

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha lainnya melalui kegiatan GISELA, Kemitraan, perizinan dan kelembagaan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja UMKM KP yang difasilitasi pemberdayaan usaha pada triwulan III tahun 2024 antara lain:

1. Terlaksananya Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi data KUSUKA dalam aplikasi Sistem Informasi Kredit Program.
 - Rapat dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024 dan dihadiri oleh perwakilan dari Pusdatin, Timja Data Setditjen PDSPKP, Dit Pemberdayaan Usaha. Rapat bertujuan untuk memperoleh masukan terkait ketentuan dalam Permenko dan Permen KP tentang kewajiban bagi Kementerian/Lembaga untuk mengunggah data calon debitur
 - Saat ini Dit PU hanya bisa menarik data realisasi penyaluran KUR dan belum bisa mengunggah data UMKM calon penerima KUR karena kewenangan ini baru bisa dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi. Perlu kejelasan tentang Keterbatasan wewenang Dit PU dalam SIKP seperti apa, kebutuhan data di SIKP seperti apa, dan selanjutnya mekanisme pertukaran data.
 - Sesuai amanah dari peraturan perundangan KKP dapat mengupload data calon debitur di SIKP, dan Itjen memberikan masukan bahwa KKP sudah memiliki data KUSUKA. Masukan dari Pusdatin dalam Pemanfaatan data KUSUKA prosedur harus ada PKS antara Pusdatin dengan PDS atau dengan Kemenkeu karena di data KUSUKA ada informasi NIK dan informasi penting lainnya, seperti yang sudah dilakukan pertukaran data antar instansi. Kemudian Data UMKM dalam KUSUKA apakah sudah memenuhi kriteria sesuai yang diminta dalam SIKP
 - Pemanfaatan kartu KUSUKA yang sudah berjalan adalah BLU, dengan BLU memberikan data calon debitur potensialnya yang memiliki KUSUKA ke Pusdatin, lalu Pusdatin menyampaikan ke BRI untuk diterbitkan kartu KUSUKA Perbankan (BRI) dan selanjutnya kartu yang sudah terbit disampaikan ke bank cabang masing2 untuk didistribusikan kepada Dinas KP dan penyuluh untuk bisa disampaikan ke masing2 pemilik kartu KUSUKA.

2. Rapat Sinkronisasi Data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) KKP dengan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan.

- Rapat pada tanggal 18 Juli 2024 dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pembiayaan, dan dihadiri oleh perwakilan dari Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan – Kemenko Perekonomian, Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan – Kementerian Keuangan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi – Kementerian Keuangan, Inspektorat IV Itjen KKP, Pusdatin Setjen KKP, Tim Kerja Data - Setditjen PDSPKP, Direktorat PBM - Ditjen PDSPKP dan Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha.
- Rapat bertujuan untuk memenuhi amanat dari Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 dan Permen KP nomor 46 Tahun 2023 dalam hal kewajiban Kementerian/Lembaga untuk melakukan unggah data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP.
- Mekanisme integrasi data dilakukan melalui interkoneksi data SIKP dan Kusuka, dengan selanjutnya melakukan penyesuaian struktur data yang menjadi *mandatory* dari aplikasi SIKP. Format data ADK yang diperlukan oleh aplikasi SIKP adalah sebanyak 23 *field* dengan 11 data yang *mandatory* sebagaimana terlampir dalam memo ini. Dari data *mandatory* dimaksud, hanya field Nomor Ijin Berusaha yang tidak ada di database KUSUKA, namun hal ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut secara teknis.
- Berkenaan dengan sifat kerahasiaan data maka integrasi data harus didahului dengan penandatanganan PKS antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait batasan dan teknis interkoneksi data yang dibutuhkan, sebagaimana dimaksud pada Poin 3. Penandatanganan PKS diharapkan bisa terealisasi pada tahun 2024, karena sejalan dengan rencana pengembangan aplikasi KUSUKA pada tahun 2024, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan penyesuaian data antar instansi. Secara paralel dengan rencana penandatanganan PKS, dapat dilakukan pembahasan teknis pembukaan jalur koneksi antar unit kerja terkait di KKP dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Kementerian Keuangan.

3. Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 11 Juli 2024.

- Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Direktur Usaha dan Investasi, serta dihadiri oleh kurang lebih 120 peserta yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, penyuluh perikanan, UMKM perikanan (pembudidaya, pengolah, pemasar) dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo.
 - Acara menghadirkan narasumber yang berasal dari : (1) Manager Bisnis Mikro PT BRI dengan materi Program Pembiayaan dalam mendukung UMKM KP Naik Kelas; (2) Pimpinan Cabang PT. PNM Yogyakarta dengan materi Dukungan PT PNM dalam program pemberdayaan UMKM sektor KP; (3) Pelaku UMKM Berkah Galeri Jaya yang menyampaikan materi success story usaha budidaya perikanan; (4) Direktorat Pengolahan dengan materi Pentingnya GMP (SKP) dalam menjamin keamanan produk; dan (5) Direktorat Usaha dan Investasi dengan materi Perizinan Berusaha (NIB)
 - Mayoritas pelaku usaha adalah usaha mikro kecil, sehingga kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas, dan sebagai langkah awal untuk memperkenalkan program-program pembiayaan yang bisa dimanfaatkan para pelaku usaha sebagai bantuan akses permodalan.
 - Acara dirangkai dengan penyerahan akses permodalan kepada para pelaku usaha oleh BRI dan PNM yaitu: (1) BRI: Suryadi (pembudidaya) sebagai penerima KUR sebesar Rp30 juta dan Suranto (pemasar dan pembudidaya) sebagai penerima KUR sebesar Rp100 juta; (2) PNM: Yuliana Nilam Kusuma (pengolah) sebagai penerima Mekaar sebesar Rp6 juta dan Nur Hikmah (pengolah) sebagai penerima Mekaar sebesar Rp5 juta.
4. Rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja Akselerasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Sektor Kelautan Dan Perikanan Semester 1 Tahun 2024
- Rapat dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Usaha dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. BNI, PT. BSI, PT. Pegadaian, LPUMKP, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan DJPT, Pusat

Penyuluhan BPPSDM, Direktorat Ikan Air Payau DJPB, Setdtjen PDSPKP, dan Direktorat Pemberdayaan Usaha.

- Pada semester 1 2024 realisasi pembiayaan kredit program pada sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp.3,64 triliun (meningkat 30 % dari tahun 2023) dengan jumlah debitur sebanyak 67.000 orang. Dari informasi satu data KKP, terdapat 3.023.180 pelaku usaha perikanan yang bisa menjadi target pembiayaan bagi lembaga perbankan/non perbankan.
- Kebijakan KUR tahun 2024 dilakukan untuk mempertajam sasaran penerima KUR yang berfokus pada perluasan penerima baru KUR dan mendorong graduasi debitur KUR, dengan suku bunga KUR berjenjang. Untuk itu KKP diharapkan dapat segera melakukan integrasi data KUSUKA dengan SIKP sebagai upaya mendorong peningkatan realisasi KUR di sektor kelautan dan perikanan.
- Semua Himpunan Bank Negara (Himbara) dan non perbankan yang hadir mendukung program-program KKP dan siap berkolaborasi dengan KKP dan apabila terdapat informasi kegiatan di Dinas Kelautan Perikanan juga dapat mengikutsertakan untuk berkolaborasi dan pihak lembaga keuangan mengusulkan pertemuan yang lebih intensif untuk mengetahui detail teknis permasalahan kendala penyaluran KUR di lapangan dan opsi skema pembiayaan lainnya, serta menginisiasi modeling pembiayaan pada lokus kegiatan prioritas KKP.
- Perlunya sosialisasi dan edukasi literasi keuangan secara intensif kepada pelaku usaha untuk meningkatkan realisasi penyaluran kredit program pada sektor kelautan dan perikanan.

5. Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 15 Agustus 2024.

- Acara dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Usaha, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan, serta dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta yang berasal dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, penyuluh perikanan, UMKM perikanan (pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar) dari Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah.

- Acara menghadirkan narasumber yang berasal dari : (1) Manager Bisnis Mikro PT BRI cabang Sungai Liat dengan materi Program Pembiayaan dalam mendukung UMKM KP Naik Kelas; (2) Pimpinan PT. PNM Cabang Bangka Belitung dengan materi Dukungan PT PNM dalam program pemberdayaan UMKM sektor KP, (3) Pelaku UMKM Renny Acu yang menyampaikan materi success story usaha pembuatan snack ringan berbahan ikan, (4) Direktorat Pemberdayaan Usaha dengan materi Perizinan Berusaha (NIB) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
- Mayoritas pelaku usaha adalah usaha mikro kecil, sehingga kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas, dan sebagai langkah awal untuk memperkenalkan program-program pembiayaan yang bisa dimanfaatkan para pelaku usaha sebagai bantuan akses permodalan.
- Prioritas dan arah kebijakan pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung pada saat ini adalah sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata. Namun kondisi usaha pengolahan di Bangka Belitung saat ini adalah produk perikanan masih diperdagangkan dalam kondisi hidup, segar, beku dan hasil olahan perikanan masih terbatas produksi skala rumah tangga serta masih lemah dalam akses pasar, modal dan jaringan usaha.
- Giat Fasilitasi Pembiayaan dirangkai dengan Layanan Terpadu Ditjen PDSPKP terkait konsultasi akses permodalan dari Bank BRI dan PT. PNM, perizinan berusaha serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari Direktorat Pemberdayaan Usaha.
- Hasil dari kegiatan adalah sebagai berikut : (1) Komitmen dari 150 pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk dinaikkan kelasnya, dengan mendukung penuh program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,/Provinsi/Kabupaten, seperti kegiatan pembinaan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait; (2) PT PNM akan berkomitmen untuk melaksanakan program klasterisasi yaitu menggolongkan beberapa orang yang memiliki usaha yang sama dan berlokasi di wilayah yang berdekatan.; (3) PT. PNM telah menyalurkan kredit Mekaar kepada 40 nasabah peserta kegiatan dengan total nilai penyaluran sebesar Rp98.040.000 yang bergerak

di bidang usaha pengolah, pemasar, kuliner ikan, dengan rata-rata pencairan sebesar Rp2 – 3 juta per orang.

6. Fasilitasi Gerai Investasi dan Layanan Usaha kepada para pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan melalui Bimbingan Teknis Pembiayaan dan Fasilitasi GISELA” pada tanggal 25 Juli 2024, di Jepara

- Bimbingan Teknis dibuka oleh Katimja Pembiayaan yang dihadiri oleh 105 peserta yang terdiri dari perwakilan Sustainable fisheries partnership (SFP) Indonesia, nelayan, pembudidaya, supplier, petambak garam, pengolah, pemasar, koperasi, forum komunikasi FORKOM) nelayan rajungan dari Kabupaten Jepara serta perwakilan penyuluh perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara.
- Narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, koordinator PTSP-DPMPTSP Kabupaten Jepara, dan ketua tim analisis kredit Bank Jateng cabang Jepara.
- Poin-poin pertemuan sebagai berikut : (1) Kabupaten Jepara memiliki potensi perikanan sebesar 10rb ton produksi perikanan tangkap, 4rb ton produksi budidaya ikan, 25rb ton rumput laut, dan garam sebesar 56rb ton; (2) NIB penting bagi pelaku usaha. Disamping sebagai identitas, NIB juga dapat digunakan untuk keperluan memperoleh bantuan pemerintah dan mengakses kredit program dari pemerintah; (3) Bank Jateng sampai dengan periode bulan Juni 2024 telah memberikan kredit kepada UMKM senilai 16,84 miliar kepada 96rb nasabah ; (4) selain KUR Bank Jateng jg memiliki kredit khusus dgn bunga murah seperti KUR yaitu Kredit Mitra Jateng (KMJ) dgn plafond maksimal 25 juta selama 3 tahun; (5) Bank Jateng juga memiliki program pembinaan kepada UMKM berupa program pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan dgn bekerjasama dengan dinas/instansi pemerintah.
- Hasil kegiatan dari kegiatan fasilitasi adalah : (1) Terdapat 15 pelaku usaha sektor perikanan yang terfasilitasi perizinan berupa pengajuan NIB baru, menambah kode KBLI baru dan mengupdate data usaha; (2) Anggota koperasi FORKOM berminat untuk mengajukan kredit secara mandiri dgn pinjaman @ Rp100jt yg akan digunakan untuk operasional koperasinya; (3) SFP berkomitmen untuk memberikan pembinaan kepada nelayan rajungan supaya usahanya ramah lingkungan dan berkelanjutan serta membantu untuk

pemasaran produk rajungan ke mitra-mitra SFP.

7. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Pembiayaan di Sukabumi tanggal 9 Juli 2024

- Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Hotel Augusta Pelabuhan Ratu Sukabumi yang dibuka oleh Katimja Pembiayaan yang dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari perwakilan nelayan, pembudidaya, suplier, pengolah, pemasar, dan koperasi dari Kabupaten Sukabumi serta perwakilan penyuluh perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.
- Narasumber pada kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Analis Kebijakan Ahli Madya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, Kepala Bidang Diklat dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, Manager Bisnis Mikro Kantor BRI Cabang Cibadak, LPMUKP dan Ketua Koperasi Nelayan Berdaulat Ciwaru.
- Di Kabupaten Sukabumi, LPMUKP telah mencairkan pinjaman sebesar 4,29 Milyar kepada 158 debitur tetapi terdapat kredit macet sekitar 1,83 Milyar yang berasal dari pinjaman koperasi 609 juta, pinjaman kelompok 962 juta dan pinjaman perorangan 262 juta. Oleh karena itu untuk sementara LPMUKP melakukan moratorium untuk pinjaman kepada perseorangan dan kelompok, tetapi tetap terbuka untuk koperasi.
- Untuk mempercepat proses layanan, LPMUKP telah membuat sistem online *Loan Orination System* (LOS) untuk pengajuan proposal pinjaman. Koperasi Nelayan Berdaulat Ciwaru saat ini dalam proses pengajuan pinjaman sebesar 2 Milyar.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada tahun 2024 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp3.300.000.000,-, hingga triwulan III anggaran yang terserap sebesar Rp1.848.300.248,- atau setara dengan 56,01% dari total anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 57,42% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 56,01%.

IK8. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)

Fasilitasi kemitraan usaha merupakan kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk mampu mengembangkan jaringan usahanya melalui kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha menengah besar. Fokus dari fasilitasi kemitraan usaha ini tersebar di seluruh bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.

Capaian ini diperoleh dengan menghitung setiap UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir adalah pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah atau besar yang berminat dan/atau melakukan kemitraan usaha atau pelaku usaha skala mikro atau kecil yang difasilitasi dalam program sertifikasi produksi untuk menunjang kegiatan usaha.

Tabel 3. 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	96	-	-	125	75	-	-	75	78,13	-	-	60

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 125 UMKM. Capaian output UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 75 UMKM yang terdiri dari 70 UMKM yang terfasilitasi kemitraan, 3 UMKM yang terfasilitasi layanan perizinannya dan 2 UMKM yang terfasilitasi pembinaan melalui start up. Capaian ini setara dengan 78,13% dari target triwulan II sebanyak 34 UMKM. Jika diakumulasikan sampai dengan triwulan II maka capaian UMKM yang difasilitasi kemitraan usaha sebanyak 96 UMKM atau setara dengan 60% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dari target 125 pelaku usaha. capaian

ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat metode perhitungan baru untuk IKU UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir yaitu dengan menambahkan jumlah pelaku usaha yang berminat/akan melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha yang melakukan kemitraan dalam rangka pengembangan usaha dan implementasi perizinan usaha dan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraannya dengan startup perikanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini sebagai berikut:

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Usaha Rumput Laut yang Berkelanjutan

- Telah dilakukan penandatanganan antara PT. Winner Perkasa Indonesia Unggul, Kelompok Subur Makmur (mitra PT. Agarindo Bogatama) dan Bumdesma Tirtayasa dengan para pelaku usaha pembudidaya rumput laut. Dalam nota kesepahaman tersebut masing-masing pihak sepakat untuk mendapatkan kepastian pasar dan memenuhi kebutuhan bahan baku rumput laut sesuai kualifikasi UPRL.



Gambar 3. 25 Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman

2. Fasilitasi Kemitraan Usaha Hulu Hilir Di Semarang, Jawa Tengah

- Dalam rangka fasilitasi kemitraan usaha hulu hilir pada Sektor Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 13 Agustus 2024 di Aston Inn Semarang telah diselenggarakan Fasilitasi Kemitraan dan Penguatan Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan dengan hasil sebagai berikut:

- Pada pertemuan tersebut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Bpk. Fendiawan, Direktur Pemberdayaan Usaha dalam hal ini diwakili Katimja Pelayanan dan Kemitraan Usaha, Perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap, Perwakilan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Ditjen Industri Agro – Kementerian Perindustrian, dan Perwakilan Pusat Data dan Informasi – Kementerian Perdagangan.
- Adapun peserta yang hadir terdiri atas perwakilan Pengurus Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), DPD HNSI Jawa Tengah, Himpunan Nelayan Pursein Jawa Tengah, Paguyuban Nelayan Kota Tegal, Bakul Perikanan Kota Semarang, UPI Pengolahan Surimi dan Olahan lainnya, Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Jawa Tengah, Paguyuban Mina Santosa Juwana Pati, serta Asosiasi lainnya.
- Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendorong peningkatan skala dan keberlanjutan usaha dan fasilitasi kemitraan antar pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan serta melakukan kolaborasi dan sinergi internal lingkup KKP serta lintas Kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, maupun pelaku usaha dan asosiasinya untuk bersama-sama melakukan penguatan usaha melalui pertemuan ini.
- Kolaborasi antar pemangku kepentingan saat ini menjadi sangat penting dalam mendorong percepatan pengembangan usaha serta diharapkan akan menyentuh seluruh permasalahan yang dihadapi pelaku usaha saat ini.
- Sosialisasi **kebijakan Kemitraan Usaha Sektor KP yang diatur dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023**, disampaikan oleh Katimja Pelayanan dan Kemitraan Usaha dan mensosialisasikan **Penguatan Kelembagaan untuk Mendukung Usaha Produk KP** yang disampaikan oleh Katimja Kelembagaan.

Melalui pertemuan ini beberapa pelaku usaha yang hadir telah menandatangani nota kesepahaman sebagai komitmen kemitraan untuk pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang diketahui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3. 26 Fasilitasi Kemitraan dan Penguatan Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan

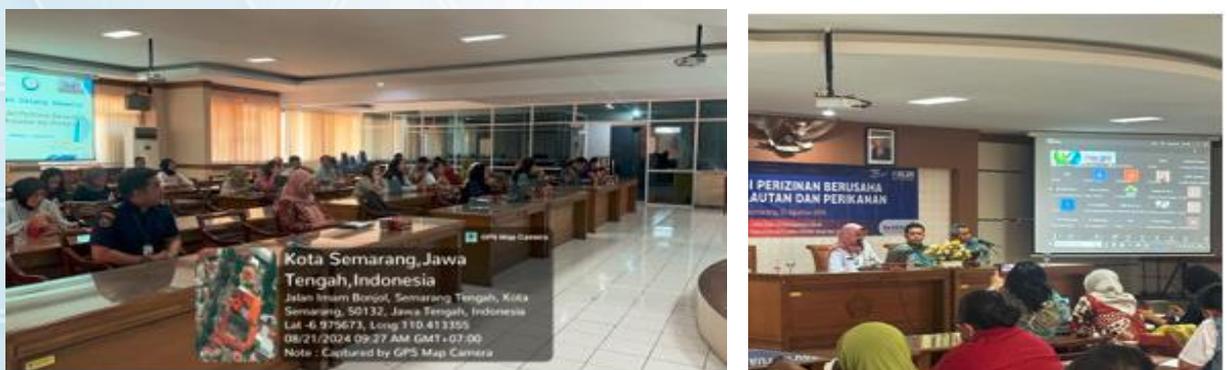
3. Fasilitasi Pelayanan Publik Sektor Kelautan dan Perikanan

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 secara luring dan daring di ruang rapat rajungan lantai III, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
- Kegiatan dibuka oleh Katimja Pelayanan dan Kemitraan dan dihadiri secara luring sebanyak 70 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jawa Tengah, DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah dan pelaku usaha di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara daring di hadir 50 peserta yang terdiri dari Pusdatin KKP, perwakilan eselon 2 lingkup Ditjen PDS dan pelaku usaha di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Total peserta yang mengikuti melalui aplikasi Zoom Meeting berjumlah 106 orang.
- Kegiatan ini diharapkan dapat mensinergikan dan mengimplementasikan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan semakin baik dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi
- Narasumber yang hadir pada kegiatan terdiri dari DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah yang menyampaikan materi implementasi perijinan berusaha berbasis resiko sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan materi implementasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan dengan materi penerapan sanksi administrasi bagi pelanggaran ketentuan perizinan berusaha dan kelayakan pengolahan bagi unit pengolahan ikan serta materi pemenuhan

persyaratan verifikasi rencana kegiatan usaha perijinan berusaha sub sektor pengolahan ikan

- Beberapa hal yang menjadi diskusi selama kegiatan dapat kami sampaikan antara lain:
 - 1) sistem perizinan OSS sifatnya adalah post audit, yang mengandung makna bahwa pelaku diberikan tanggungjawab untuk memenuhi komitmen dari izin yang telah diterbitkan pemerintah. Sehingga diperlukan komitmen kedua belah pihak untuk optimalnya berjalannya usaha
 - 2) untuk permohonan pengajuan sertifikat standar sub sektor pengolahan ikan maka pelaku usaha harus membuat rencana kegiatan usaha yang berisi data terkait jenis usaha; sumber dan nilai investasi; jenis dan asal bahan baku; sarana produksi yang digunakan; tata letak dan gambaran proses produksi; dan wilayah pemasaran. Disamping rencana kegiatan usaha agar dilengkapi dengan surat pernyataan lokasi, surat pernyataan kesanggupan standar usaha, durasi pemenuhan rencana usaha, kesanggupan pemenuhan PB UMKU dan kesanggupan pemenuhan LKU
 - 3) kendala dalam pengurusan perijinan berusaha adalah pemenuhan kelengkapan izin dasar (persetujuan lingkungan/PL, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/KKPR, persetujuan bangunan gedung/PBG dan sertifikat laik fungsi/SLF), kesalahan dalam penentuan KBLI dan kesalahan dalam perhitungan skala usaha
 - 4) perusahaan an. PT Indo Seafood Korea yang belum terbit SKP nya dikarenakan sertifikat standarnya belum terverifikasi, oleh karena itu disarankan agar segera memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikat Standar serta berkoordinasi dengan Dit Pengolahan dan Badan Mutu yang saat ini melakukan verifikasi SKP
 - 5) perusahaan an. PT Toxindo Prima terkendala pemenuhan persyaratan sertifikat standar perihal ijin PKKPR, untuk itu disarankan agar menyampaikn permohonan peninjauan kembali kepada pemda setempat terkait lokasi RTDR

- 6) kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan usaha dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan memuat minimal perihal jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; omzet; tenaga kerja; asal bahan baku; jenis dan volume ikan; dan jenis dan volume produk yang dihasilkan
- 7) pengawasan pengolahan hasil perikanan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang juknis pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.
- 8) sifat penerapan sanksi pengawasan terdiri dari bertahap (didahului sanksi yang paling ringan sampai paling berat), tidak bertahap (kewenangan pejabat berwenang untuk menentukan pilihan jenis sanksi), kumulatif internal (menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran), kumulatif eksternal (penggabungan salah satu jenis sanksi administratif dengan sanksi lainnya diluar)
- 9) norma penerapan sanksi administrasi terdiri dari tahapan teguran/peringatan, paksaan pemerintah, denda administrasi, pembekuan perijinan berusaha dan pencabutan perijinan berusaha
- 10) pelaku usaha mengharapkan agar sering dilakukan kegiatan sosialisasi sehingga update terkait kebijakan perijinan dan regulasi perijinan tersampaikan kepada setiap pelaku usaha



Gambar 3. 27 Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa tengah

4. Penerbitan Sertifikat Standar

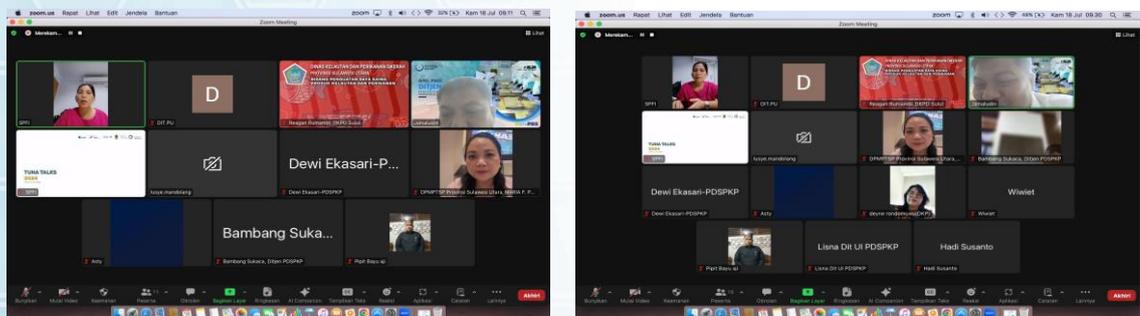
- Kegiatan verifikasi kelengkapan standar usaha selama periode triwulan III 2024, telah dilaksanakan 7 (tujuh) rapat verifikasi, pertemuan ini bertujuan dalam rangka membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha dan permohonan penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi yang beranggotakan: Pusat Data, Statistik, dan Informasi - Setjen, Bagian Hukum - Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, BBP3KP, serta Koordinator kelompok lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP.
- Adapun Selama periode Juli - September 2024 telah diterbitkan 16 sertifikat standar kepada 11 pelaku usaha yang bermohon sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan, 11 pelaku usaha yang telah diterbitkan sertifikat standarnya antara lain :
 - 1) Industri Perikanan Terpadu Chiu Shih
 - 2) Yuxing Algae International
 - 3) Golden Seafood Indonesia
 - 4) Aneka Tuna Indonesia
 - 5) Ameritindo Cerah Terpadu
 - 6) Citradimensi Arthali
 - 7) Pacific Green Algae
 - 8) Onedegreefish Indonesia Maumere
 - 9) Nutrindo Joga Shima
 - 10) Indonesia Bahari Lestari
 - 11) Indo Seafood Korea



Gambar 3. 28 Dokumentasi Kegiatan Penerbitan Sertifikat Standar

5. Rapat Koordinasi Penerbitan Sertifikat Standar

- rapat koordinasi penerbitan Sertifikat Standar Sub Sektor Pengolahan Ikan di Provinsi Sulawesi Utara, dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Pelaku Usaha (PMA), Pusat Data, Statistik, dan Informasi - Setjen, serta perwakilan tim kerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP pada tanggal 18 Juli 2024 melalui video conference.
- Hasil diskusi rapat dapat disampaikan sebagai berikut :
Pelaku usaha / PT. Sinar Pure Foods International :
 - 1) Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk beberapa KBLI, antara lain : 10213, 10219, dan 10221.
 - 2) Perusahaan memiliki kendala dalam proses penyelesaian izin dasar, yaitu pemenuhan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang sedang di verifikasi oleh Kementerian ATR / BPN.
 - 3) Selain memiliki kendala dalam penyelesaian izin dasar, pelaku usaha kesulitan dalam input dokumen persyaratan pada sistem oss.
 - 4) Produk yang ingin diajukan, antara lain : ikan beku untuk KBLI 10213, dan tepung ikan untuk KBLI 10219.
 - 5) Untuk KBLI 10221, pengajuan izin usahanya diarahkan pada kementerian perindustrian, karena merupakan kewenangan kementerian perindustrian.
 - 6) Direktorat Pemberdayaan Usaha akan mengkoordinasikan terkait pengajuan penerbitan PT. Sinar Pure Food dan PMA lain yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
 - 7) Mengingatkan kembali kepada pelaku usaha untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang akan dikirimkan setelah Sertifikat Standar terbit, yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan penerbitan izin usaha subsektor pengolahan.



Gambar 3. 29 Dokumentasi Kegiatan koordinasi penerbitan Sertifikat Standar Sub Sektor Pengolahan Ikan di Provinsi Sulawesi Utara

6. Rapat Koordinasi Terkait PT. Agro Boga Utama dan Supervisi Pengawasan

- Rapat dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, Pangkalan PSKDP Bena serta Tim kerja Pelayanan dan Kemitraan pada tanggal 6 September 2024 di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, serta melalui video conference.
- Tujuan rapat dalam rangka koordinasi dan validasi temuan pengawasan oleh Pangkalan PSDKP Bena terhadap PT. Agro Boga Utama di Sidoarjo. Rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut perusahaan yang konsultasi ke PTSA KKP, PT. Agro Boga Utama menyampaikan bahwa perusahaan memiliki hampir 26 cabang. Konsultasi, terkait salah satu cabang nya mendapatkan temuan dari Pengawas Perikanan Tanjung Bena dikarenakan tidak memiliki KBLI 10217
- PT Agro Boga Utama merupakan Perusahaan bergerak di bidang distribusi produk, baik olahan daging, ikan, dan produk lainnya, Perusahaan induk terdapat di Kota Depok Prov Jawa Barat, Perusahaan mengajukan izin usaha / SIUP Pengolahan pada awal Februari 2021, dan izin diterbitkan 26 Februari 2021 untuk lokasi usaha yang terletak di Bojongsari, Kota Depok. PT Agro Boga Utama di Sidoarjo merupakan cabang dari perusahaan yang di Depok. Alamat PT Agro Boga Utama Sidoarjo adalah Jl Monumen 44 RT 05 RW 02 Kel Wonoplintahan, Kec Prambon, Kab Sidoarjo
- Berdasarkan hasil temuan Ditjen PDSPKP, PT Agro Boga Utama terdapat sertifikat standar yang belum di terbitkan, tidak terdapat kegiatan KBLI10217 di lokasi usaha, LKU dan LKPM sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil temuan tersebut maka disarankan agar perusahaan menghapus KBLI yang tidak ada kegiatannya



Gambar 3. 30 Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Terkait PT. Agro Boga Utama dan Supervisi Pengawasan

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp1.051.282.846,- atau setara dengan 61,80% dari total pagu sebesar Rp1.701.000.000,-. Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 60%, hal ini dikarenakan penyesuaian target indikator kinerja utama akibat adanya *automatic adjustment* masih dalam tahap pengusulan kepada Sesditjen PDSPKP.

3.2.6 Sasaran Strategis 6

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

IK9. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha didefinisikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dalam lingkup penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada Direktorat Pemberdayaan Usaha. Untuk mencapai capaian tersebut tenaga kerja yang dihitung adalah setiap tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi ataupun tenaga kerja yang tidak langsung pada proses produksi pada masing-masing usaha mikro kecil dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan fasilitasi sosialisasi dan pembinaan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Tabel 3. 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha	6860	4794	-	10770	9237	5044	-	9237	134,65	192,67	-	85,76

Pada tahun 2024, target tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha sebanyak 10.770 orang sedangkan target pada triwulan III sebanyak 6860 orang. Capaian realisasi yang telah dihitung oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha pada triwulan III adalah sebesar 9237 orang tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung atau setara dengan 134,65% dari target pada triwulan III.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk mendukung capaian ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Bekasi dan Karawang
Pra pembentukan lembaga usaha hasil KP dalam rangka peningkatan kelembagaan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2024 di tuban. Dari hasil pertemuan yang dilakukan ditetapkan bahwa nama calon koperasi desa Bulumeduro Tuban memiliki calon anggota yang terdiri dari 7 KUB dan 12 Poklahsar dengan jumlah anggota seluruhnya berjumlah 96 orang. Prapendirian Koperasi Di Kabupaten Serang dikalsanakan pada tanggal 22 Mei 2024, calon koperasi di Kabupaten Serang terdiri dari 3 kelompok antara lain Poklahsar Bahari Maju Bersama Kabupaten Serang, Poklahsar Mekar Sari Jaya Bahari Kabupaten Serang, KUB Bahtera Jaya Kabupaten Serang.
2. Fasilitasi kewirausahaan;
Dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Baru, serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha melalui UMKM Naik Kelas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto, Probolinggo, Semarang, Pasuruan, Bogor dan Sampang pada periode bulan April – Juni 2024.
Selain pembinaan juga telah dilaksanakan kegiatan penciptaan wirausaha baru kelautan dan perikanan berbasis pondok pesantren (*santripreneur*). Kegiatan ini telah dilakukan kepada 30 orang Santri di Pondok Pesantren Addainuriyah Dua, Semarang.

3. Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI. Bimtek ini telah telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Melawi Kalimantan Barat dan Kupang NTT.
4. Temu fasilitasi akses pembiayaan kredit kelautan dan perikanan di Tuban, 21 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan, akses pembiayaan, serta fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha ultra mikro dalam rangka mendorong UMKM KP naik kelas melalui akses pembiayaan kredit program berbasis klaster pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Narasumber utama berasal dari Bank Mandiri dan PT Pegadaian yang menyampaikan materi literasi keuangan terkait program Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Ultra Mikro, dan skema pembiayaan lainnya (gadai emas, Tabungan haji).
5. Bimbingan Teknis Pembiayaan dan Fasilitasi GISELA di Bali dan Banyuwangi. Bimbingan Teknis dibuka oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari perwakilan nelayan, suplier, pengolah, pemasar, dan koperasi serta perwakilan penyuluh perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Narasumber pada kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan lembaga keuangan bank dan nonbank. Tujuan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Bali untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui Lembaga Perbankan dan Non Perbankan serta menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk meningkatkan usahanya.
6. Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Jawa Timur; Dalam rangka fasilitasi kemitraan usaha dan pelayanan publik telah dilakukan kegiatan komitmen kemitraan bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tulungagung yang berlokasi di Semilir Resort pada tanggal 30 April 2024. Pada pertemuan tersebut hadir mewakili Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tulungagung yaitu Ketua Tim Pelayanan Usaha dan Hasil Perikanan, serta 9 (Sembilan) UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah Kab. Tulungagung yaitu UMKM Berkah Lumintu, Sumber Rejeki, Sumber Anugerah, Wanita Mulia, Mina Karya Putri, Karang Mulya, Mina Segar, Mina Miren dan Mina Bhakti Jaya.

Melalui pertemuan ini beberapa pelaku usaha telah menandatangani Nota Kesepahaman sebagai komitmen kemitraan sehingga dapat dijadikan landasan bagi kerjasama di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Pada pertemuan tersebut dihadiri Dinas Perikanan dan Peternakan Provinsi/Kab/Kota, UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah-wilayah tersebut.

Melalui pertemuan ini juga pelaku usaha telah menandatangani nota kesepahaman sebagai komitmen kemitraan untuk dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat dilakukan Analisa kebutuhan para pelaku usaha untuk dibangun kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan kedepannya.

3.2.7 Sasaran Strategis 7

Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

IK10. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Tabel 3. 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	-	75	-	75	-	82,33	-	-	-	109,77	-	-

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2024 ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian target dimaksud, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk menindaklanjuti hasil revidi Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

IK11. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/ magang/ kursus.

Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin.

Tabel 3. 12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	-	83,2	-	87	-	92,11	-	85,11	113,48	110,71	-	97,82

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2024 ditargetkan sebesar 87. Capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebesar 85,11 atau setara 97,82 apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2024.

Berdasarkan data Dashboard IP ASN, nilai IP ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen yaitu sebesar 81,39 (kategori tinggi) yang terdiri atas komponen Kualifikasi 21,18; komponen Kompetensi dengan nilai 30,38; komponen Kinerja dengan nilai 24,83; dan komponen Disiplin dengan nilai 5.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIJEN Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	76	21.64	86.56 %	25.1	62.75 %	25.2	84 %	5	100 %	76.94	SEDANG
2	DIREKTORAT LOGISTIK	50	22.1	88.4 %	28.33	70.82 %	24.2	80.67 %	5	100 %	79.63	SEDANG
3	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU	50	22.34	89.36 %	33.99	84.97 %	25.1	83.67 %	5	100 %	86.44	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMASARAN	57	21.63	86.52 %	32.52	81.3 %	25.09	83.63 %	5	100 %	84.24	TINGGI
5	DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI	38	22.34	89.36 %	32.63	81.58 %	25.13	83.77 %	5	100 %	85.11	TINGGI
6	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	87	21.18	84.72 %	30.38	75.95 %	24.83	82.77 %	5	100 %	81.39	TINGGI

Gambar 3. 31 Dashboard IP ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024

Pada triwulan III, kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas berdasarkan rencana aksi yang telah disusun yaitu (1) pelayanan kepegawaian dan (2) peningkatan kompetensi pegawai yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan rapat pembahasan teknis acara jiwa korsa lingkup PDSPKP tanggal 19 April 2024 di GMB III KKP.
2. Pemantauan pengisian kinerja pegawai pada aplikasi kinerja BKN triwulan I tahun 2024 tanggal 25 April 2024 di Raiser Ikan Hias, Kab. Bogor.
3. Menghadiri undangan Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024 tanggal 29 April 2024 di Hotel Raffles Jakarta.
4. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Kode Etik Pegawai Ditjen PDSPKP tanggal 22 Mei 2024 di GMB KKP.

IK12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan revidi laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

Tabel 3. 13 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan III Tahun 2024

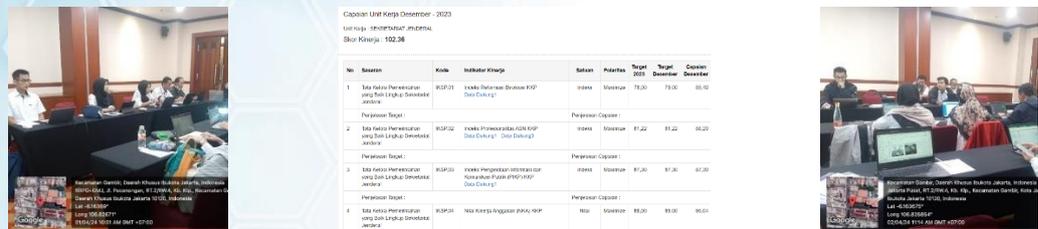
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW II 2023	
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	-	80,5	-	84	-	83,30	-	-	-	103,48	-	-

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi Kinerja KKP yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2024 ditargetkan 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

Pada triwulan II, kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas diantaranya:

- 1) Pembahasan pengukuran capaian kinerja lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 2024, penginputan capaian kinerja pada SAPK dan verifikasi capaian kinerja triwulan I Tahun 2024 tanggal 1-2 April 2024 di Red Top Hotel Jakarta.



Gambar 3. 32 Pembahasan pengukuran capaian kinerja lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 2024

- 2) Pembahasan laporan kinerja level 1 dan 2 Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 2024 tanggal 4-5 April 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong.



Gambar 3. 33 Pembahasan laporan kinerja level 1 dan 2 Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun 2024

- 3) Pembahasan validasi indikator kinerja level I Ditjen PDSPKP tahun 2024 dan validasi indikator kinerja level II Ditjen PDSPKP tahun 2024 pada tanggal 14 Mei 2024 di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Jl. Sempur No 1, Kota Bogor.



Gambar 3. 34 Pembahasan validasi Indikator Kinerja Level I dan II Ditjen PDSPKP Tahun 2024

- 4) Rapat evaluasi pencapaian target rencana aksi pengelolaan sampah plastik sektor kelautan dan perikanan, serta pembahasan sasaran dan indikator kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 tanggal 16 Mei 2024 di RR.Investasi, GMB III.



Gambar 3. 35 Pembahasan Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029

- 5) Rapat pemutakhiran target dan capaian rencana aksi nasional (RAN) Kewirausahaan dan KUKM triwulan I tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 di RR Biro Perencanaan, GMB I, KKP, Jakarta.



Gambar 3. 36 Rapat pemutakhiran target dan capaian rencana aksi nasional (RAN) Kewirausahaan dan KUKM TW I Tahun 2024

- 6) Rapat pemutakhiran data progres pencapaian output lingkup Ditjen PDSPKP sampai dengan bulan Mei 2024 tanggal 29 Mei 2024 di RR Setditjen PDSPKP GMB III, KKP, Jakarta.



Gambar 3. 37 Rapat pemutakhiran data progres pencapaian output lingkup Ditjen PDSPKP sampai dengan bulan Mei 2024

- 7) Pembahasan mekanisme dan pedoman SAKIP serta uji coba penilaian PM SAKIP lingkup Ditjen DSPKP tahun 2024 tanggal 4-6 Juni 2024 di Red Top Hotel, Jakarta.



Gambar 3. 38 Pembahasan Mekanisme dan Pedoman SAKIP serta Uji coba penilaian PM SAKIP lingkup Ditjen DSPKP Tahun 2024

- 8) Penyusunan tindak lanjut rekomendasi pencapaian indikator kinerja level I dan level II triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2023, dan triwulan I tahun 2024 pada tanggal 10 Juni 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong dan 11 Juni 2024 di Wisma Gracilaria, Jakarta.



Gambar 3. 39 Penyusunan tindak lanjut rekomendasi pencapaian indikator kinerja level I dan level II triwulan I s.d triwulan IV tahun 2023, dan triwulan I tahun 2024

- 9) Penilaian mandiri SAKIP unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2024 tanggal 19-21 Juni 2024 di Grand Mercure Jakarta.



Gambar 3. 40 Penilaian Mandiri SAKIP Unit Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024

IK13. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3. 14 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (persentase)	-	100	-	100	-	100	-	-	-	100	-	-

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2024 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

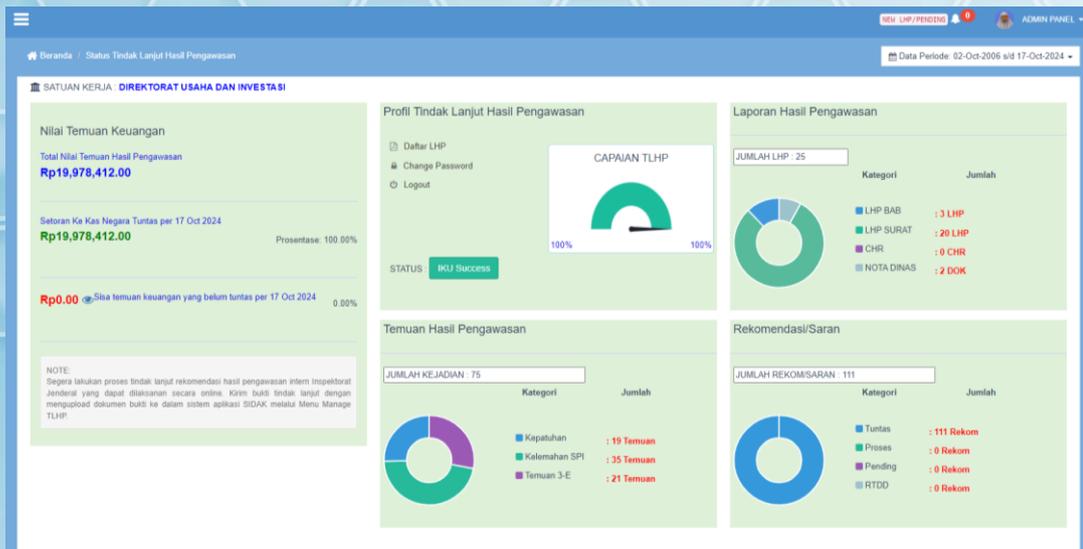
IK14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit. Pengukuran capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dilakukan setiap triwulan.

Pada Triwulan IV 2023, Direktorat Pemberdayaan Usaha dengan difasilitasi oleh Ditjen PDSPKP telah mengikuti pembahasan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan pada tanggal 15 Desember di Raiser Ikan Hias, Cibinong, terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan II 2024, Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK, tindak lanjut hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II 2024 mencapai 100%, dimana seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan.

Tabel 3. 15 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	s.d TW III 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	80	75	75	80	100	100	100	100	125	133,33	120	120



Gambar 3. 41 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 16 Oktober 2024

IK15. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang

ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 3. 16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024 Tahun 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	-	1	-	1	-	2	-	-	-	200	-	-

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang disusun oleh Ditjen PDSPKP, diseleksi dan diajukan ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh Koordinator Reformasi. Pada tahun 2024, nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 75. Capaian pada Indikator kinerja ini adalah 79,79 setara dengan 106,39%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%).

Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

IK16. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur sasaran kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Portal *Collaboration Office* (Coofis) di laman <https://portal.kkp.go.id> periode Triwulan III Tahun 2024, yang pengukurannya dilakukan setiap triwulan. Capaian kinerja persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024 Tahun 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	94	92	92	94	133,33	133,33	133,33	133,33	141,84	144,92	144,92	141,84

Pada triwulan III tahun 2024, persentase unit kerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar mencapai 133,33% atau setara dengan 141,84% terhadap target triwulan III tahun 2024

sebesar 94%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya target indikator kinerja ini mengalami kenaikan sebesar 2,17% dari capaian tahun 2023 sebesar 92%.

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan III Tahun 2024 menggunakan *Platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>).

IK17. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Pada tahun 2023, Direktorat Pemberdayaan Usaha menetapkan target persentase realisasi anggaran sebesar 95 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

Tabel 3. 18 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW III terhadap target 2024
	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW IV 2023	TW III 2023	
Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	-	95	-	93,75	-	99	-	-	-	104,21	-	-

Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2024 ditargetkan 93,75%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024. Namun dalam rangka memenuhi indikator kinerja tersebut realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar Rp10.528.923.775,- dari total anggaran sebesar Rp17.806.985.000,- atau setara dengan 59,13%.



BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan yang telah ditempuh serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode triwulan III tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan sesuai target.

Dalam masa *recovery* setelah pandemi Covid-19 berdampak pada adanya perubahan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan dengan kondisi global yang mulai kembali seperti sebelum adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya penyesuaian kegiatan pada periode awal di tahun 2024. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Pemberdayaan Usaha terus melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi terkait. Diharapkan pada periode berikutnya akan terjadi percepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga Indikator Kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

4.2. Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha;

2. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program di Kabupaten Lamongan dan Kota Kendari
3. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait percepatan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan II 2024, sebagai berikut:

No	Rekomendasi Triwulan II 2024	Tindak Lanjut Pada Triwulan III 2024
1	Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha;	Telah dilaksanakan Fasilitasi Pelayanan Publik Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 21 Agustus 2024 secara luring dan daring di ruang rapat rajungan lantai III, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dihadiri secara luring sebanyak 70 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jawa Tengah, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan pelaku usaha di wilayah Provinsi Jawa Tengah
2	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program di Kabupaten Sukabumi, Bangka, Yogyakarta dan Jepara	Telah dilaksanakan Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Hotel Augusta Pelabuhan Ratu Sukabumi 2. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024, bertempat di Ruang Rapat Parai Kantor Bupati Kepulauan Bangka Belitung, 3. kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024, di Ruang Gurami Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi D.I. Yogyakarta. 4. Bimbingan Teknis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat

		Gedung Shima, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
3	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi Data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) KKP dengan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan pada tanggal 18 Juli 2024 2. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran kredit program secara daring dan luring oleh Tim Kelompok Kerja Akselerasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Sektor Kelautan Dan Perikanan di Ruang Rapat Branding Lantai 15 Gedung Mina Bahari III pada tanggal 12 Agustus 2024

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**
Jabatan : Direktur Usaha dan Investasi

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan


Budi Sulistiyo

PIHAK PERTAMA,
Direktur Usaha dan Investasi


Catur Sarwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
		2.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2.	Tersedianya dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	3.	Dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i> (Dokumen)	4
3.	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4.	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	4
4.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	5.	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	45
5.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	6.	Wirusaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	875
		7.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	2.565
		8.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)	125
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	9.	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	10.770
7.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	10.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75
		11.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	87
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	84

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	13. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	100
	14. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80
	15. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1
	16. Persentase unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94
	17. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	93,75

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000)
1.	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	22.723.500
Total Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024		22.723.500

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

PIHAK PERTAMA,
Direktur Usaha dan Investasi



Catur Sarwanto

Lampiran 2.

Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM
Nomor 545/DJPDSPKP.2/TU.140/VI/2024

Yth. : Direktur Jenderal PDSPKP
Dari : Direktur Usaha dan Investasi
Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II Direktorat Usaha dan Investasi dan Realisasi Anggaran Periode Triwulan II Tahun 2024
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 12 Juli 2024

Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian IKU dan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Usaha dan Investasi yang telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dokumen Peluang Investasi yang Ready to offer

Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas. Penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Peluang Investasi Komoditas Tuna, secara presentase capaian realisasi dokumen peluang investasi *ready to offer* sebesar 25% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni 4 dokumen.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp241.738.104,- atau setara dengan 21,45% dari total pagu sebesar Rp1.126.953.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 75%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 21,45%.

2. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Capaian kinerja promosi usaha dan investasi pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 2 kegiatan promosi yaitu *Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024* yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 dan *Indonesia Tuna Investment and Business Forum (ITIBF) 2024* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sehingga secara akumulatif sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah tercapai sebanyak 3 kegiatan atau tercapai 75% dari target tahun 2024 yakni 4 kegiatan.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.212.755.389,- atau setara dengan 53,74% dari total pagu sebesar Rp2.256.532.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 75%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 53,74%.

3. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya

Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya sampai dengan triwulan II tahun 2024 terealisasi sebanyak 10 lembaga usaha, atau setara 100% jika dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2024 sebanyak 4 lembaga. Apabila diakumulasikan maka lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya telah terealisasi sebanyak 14 lembaga atau setara dengan 31,11% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 45 lembaga. Adapun lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan II Tahun 2024, yaitu:

- 1) Koperasi nusa indah sukadami, Bekasi
- 2) Koperasi Mega Jelita Raya, Bekasi
- 3) Koperasi konsumen dermasandi maju, tegal
- 4) Koperasi Produsen Mina Guna Sejahtera, Pekalongan
- 5) Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara, Kabupaten Jepara
- 6) Koperasi Kalama Wangi Jaya, Kabupaten Banyuwangi
- 7) Koperasi Produsen Kerapu Warloka Bersinar, Kabupaten Manggarai Barat
- 8) Koperasi Produsen Berkah Jaya Pasir Putih, Kabupaten Karawang
- 9) Koperasi Produsen Mina Peundeuy Sedulur, Kabupaten Karawang
- 10) Koperasi Produsen Multi Pihak Mina Sagara Jaya, Rembang

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp399.367.713,- atau setara dengan 21,59% dari total pagu sebesar Rp1.850.000.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 31,11% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 21,59%.

4. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebanyak 250 UKM/wirausaha atau setara 100% dari target triwulan I, jika diakumulasikan sampai dengan triwulan II maka jumlah wirausaha yang telah ditumbuhkan/dibina sebanyak 400 UKM/wirausaha atau setara 45,71% dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebanyak 875 UKM/wirausaha. Capaian tersebut terdiri dari 300 UKM/wirausaha yang difasilitasi melalui kegiatan Pembinaan dan

Pendampingan Wirausaha Baru dan 100 UKM/wirausaha dari kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Pembiayaan.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp2.359.265.673,- atau setara dengan 31,16% dari total pagu sebesar Rp7.572.500.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp18.921.353,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran apabila dilihat dari besaran persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 45,71% yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran sebesar 31,16%.

5. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha

Capaian indikator kinerja ini terdiri dari Jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program dan jumlah UMKM Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan layanan Gisela, capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah 773 UMKM atau setara dengan 103,06% dibandingkan dengan target triwulan II sebesar 750 UMKM. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 maka persentase capaian sebesar 30,13%.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2024 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp3.300.000.000,-, hingga triwulan I anggaran yang terserap sebesar Rp1.061.871.155,- atau setara dengan 32,18% dari total anggaran. Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase realisasi capaian sebesar 30,13%, hal ini dikarenakan setiap kegiatan pemberdayaan terlebih dahulu dilaksanakan identifikasi dan rapat koordinasi dengan instansi terkait rencana pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan agar setiap stakeholder yang terlibat lebih efektif dan tepat sasaran.

6. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir

Realisasi jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah 85 UMKM, capaian ini terdiri dari 55 UMKM yang terfasilitasi kemitraan usaha dan investasi dan 3 pelaku usaha yang difasilitasi pelayanan usaha dan investasinya dan 2 pelaku usaha yang dibina melalui startup. Nilai persentase capaian ini setara dengan 108,33% dari target triwulan II atau jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 125 UMKM maka persentase capaiannya sebesar 52%.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp526.037.604,- atau setara dengan 30,93% dari total pagu sebesar Rp1.701.000.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 52% daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 30,93%.

Lampiran 3

Daftar lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya :

1. Koperasi Lele Mambo Berseri di Kabupaten Sampang ;
2. Koperasi Asap Indah Wonosari di Kabupaten Demak;
3. Koperasi Pijarmas di Kabupaten Demak; dan
4. Koperasi Sri Say Dem di Kabupaten Demak.
5. Koperasi Nusa Indah Sukadami, Bekasi
6. Koperasi Mega Jelita Raya, Bekasi
7. Koperasi Konsumen Dermasandi Maju, tegal
8. Koperasi Produsen Mina Guna Sejahtera, Pekalongan
9. Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara, Kabupaten Jepara
10. Koperasi Kalamo Wangi Jaya, Kabupaten Banyuwangi
11. Koperasi Produsen Kerapu Warloka Bersinar, Kabupaten Manggarai Barat
12. Koperasi Produsen Berkah Jaya Pasir Putih, Kabupaten Karawang
13. Koperasi Produsen Mina Peundeuy Sedulur, Kabupaten Karawang
14. Koperasi Produsen Multi Pihak Mina Sagara Jaya, Rembang
15. Koperasi Konsumen Matsya Marine Raya (Matsmara), Kota Pekalongan
16. Koperasi Produsen Kuala Raja Bahari, Kabupaten Bireun
17. Koperasi Pemasaran Pumpente Laingpatehi Bangkit, Provinsi Sulawesi Utara
18. Koperasi Pemasaran Upik Ngrejekeni Bersama, Kabupaten Kendal
19. Koperasi Konsumen Panjolo Karto Mukti, Kabupaten Gunung Kidul
20. Koperasi Pemasaran Mina Mulya Tenggara, Kabupaten Sragen
21. Koperasi Konsumen Nelayan Berdaulat Ciwaru, Kabupaten Sukabumi
22. Koperasi Produsen Borokoy Berkah Prima, Kabupaten Pandeglang
23. Koperasi Konsumen Mina Mekar Lestari Jaya, Kabupaten Tasikmalaya
24. Koperasi Sobat Sehati Majalengka, Kabupaten Majalengka
25. Koperasi Randegan Ikan Sejahtera, Kabupaten Bandung
26. Koperasi Produsen Pengusaha Lauk Priyangan, Kabupaten Bandung

